

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, 02 Mei 2023

Kepala Satuan Kerja,



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

NIP. 19701204 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan	ix
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	44
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Pelaporan Operasional	62
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	77
F. Pengungkapan Penting Lainnya	83
Lampiran	107

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih	14
Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 3. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2022	18
Tabel 4. Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Tahun 2022	19
Tabel 5. Pagu Anggaran pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	20
Tabel 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022	21
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 2021	22
Tabel 8. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	22
Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022	24
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021	24
Tabel 11. Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa Per 31 Desember 2022	25
Tabel 12. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022	26
Tabel 13. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022	28
Tabel 14. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021	29
Tabel 15. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022	30
Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022	32
Tabel 17. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 2021	32
Tabel 18. Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021	32
Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Rupiah Murni per 31 Desember 2022	35
Tabel 20. Rincian Penggunaan Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	36
Tabel 21. Perbandingan Belanja Barang HDN per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021	36
Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022	38
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	38
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021	39
Tabel 25. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	40
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	41
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	42
Tabel 28. Pengembangan Software Komputer (Website)	42
Tabel 29. Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	44
Tabel 30. Perbandingan Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	44
Tabel 31. Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022	45

Tabel 32. Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	46
Tabel 33. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022	46
Tabel 34. Mutasi Nilai Persediaan	46
Tabel 35. Perbandingan Rincian Tanah Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	47
Tabel 36. Mutasi Nilai Tanah	47
Tabel 37. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	48
Tabel 38. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	48
Tabel 39. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	49
Tabel 40. Rincian Hibah Masuk Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	49
Tabel 41. Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	50
Tabel 42. Rincian Reklasifikasi Keluar	50
Tabel 43. Rincian Penghentian Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	51
Tabel 44. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	51
Tabel 45. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan	51
Tabel 46. Perbandingan Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021	52
Tabel 47. Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan	52
Tabel 48. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	53
Tabel 49. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	53
Tabel 50. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021	53
Tabel 51. Mutasi Aset Tak Berwujud	54
Tabel 52. Pengembangan Nilai Aset	55
Tabel 53. Koreksi Susulan Pengembangan Nilai Aset	56
Tabel 54. Transfer Keluar Aset Tak Berwujud	57
Tabel 55. Koreksi Pencatatan Aset Tak Berwujud	57
Tabel 56. Perbandingan Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	58
Tabel 57. Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan Per 31 Desember 2022	58
Tabel 58. Mutasi Aset Lain-Lain	59
Tabel 59. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Per 31 Desember 2022	59
Tabel 60. Perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	60
Tabel 61. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	60
Tabel 62. Perbandingan Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	61

Tabel 63. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022	61
Tabel 64. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	62
Tabel 65. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021	63
Tabel 66. Mutasi Pada Beban Pegawai	65
Tabel 67. Rincian Kekurangan Uang makan PNS	65
Tabel 68. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021	66
Tabel 69. Mutasi Persediaan	66
Tabel 70. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021	67
Tabel 71. Mutasi Barang dan Jasa	68
Tabel 72. Rinciaan Beban Yang Masih Harus Dibayar	69
Tabel 73. Rincian Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Tahun Yang Lalu	71
Tabel 74. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021	71
Tabel 75. Mutasi Pada Beban Pemeliharaan	72
Tabel 76. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021	73
Tabel 77. Mutasi Pada Beban Perjalanan Dinas	73
Tabel 78. Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	74
Tabel 79. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Desember 2022 dan 2021	75
Tabel 80. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	76
Tabel 81. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	77
Tabel 82. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	78
Tabel 83. Ditagihkan ke Entitas Lain	79
Tabel 84. Rincian Transfer Keluar	80
Tabel 85. Rincian Pengesahan Hibah Langsung	81
Tabel 86. Perbandingan Kenaikan dan Penurunan Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan 2021	82
Tabel 87. Rincian Koreksi Nilai Asset Tetap Non Revaluasi	82
Tabel 88. Daftar Pejabat Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	86
Tabel 89. Rekening Rupiah Murni	87
Tabel 90. Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	88
Tabel 91. PPK Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022	88
Tabel 92. BPP Bawaslu Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2022	88
Tabel 93. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	89
Tabel 94. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	90
Tabel 95. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	91

Tabel 96. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	91
Tabel 97. Hibah Bawaslu Kabupaten Pringsewu	92
Tabel 98. Hibah Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	92
Tabel 99. Hibah Bawaslu Kota Metro	93
Tabel 100. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	93
Tabel 101. Hibah Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	94
Tabel 102. Rincian Pengembalian Belanja	103
Tabel 103. Capaian Output Kegiatan Tahapan	105
Tabel 104. Capaian Output Kegiatan Reguler	105



Jl. Pulau Morotai, No. 89, Jagabaya III, Way Halim – Bandar Lampung
Laman: lampung.bawaslu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 02 Mei 2023

Kepala Satuan Kerja,



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai periode 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp135.960,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp60.987.453.993,00 atau mencapai 90% dari alokasi anggaran sebesar Rp68.107.043.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.375.676.479,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.063.790.024,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp5.160.829.955,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp151.056.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.855.474,00 dan Rp6.372.821.005,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp139.142,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp60.892.932.602,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp60.892.796.683,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp41,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp60.892.793.419,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal sebesar Rp5.858.745.218,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp60.892.793.419,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp61.503.104.919,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp6.372.812.005,00.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2022		% thd Angg	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		0,00	135.960,00	0,00%	66.223.410,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	135.960,00	0,00%	66.223.410,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	14.248.094.000,00	13.658.722.964,00	96,00%	12.296.775.054
Belanja Barang	B.4	52.949.749.000,00	46.451.562.529,00	88,00%	29.635.950.976
Jumlah Belanja Operasi		67.197.843.000,00	60.110.285.493,00	89,00%	41.932.726.030,00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	909.200.000,00	877.168.500,00	96,00%	551.392.000,00
Jumlah Belanja Modal		909.200.000,00	877.168.500,00	96,00%	551.392.000,00
JUMLAH BELANJA		68.107.043.000,00	60.987.453.993,00	90,00%	42.484.118.030,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	3.223,00	9.000,00
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.2	1.063.066.801,00	519.116.668,00
Persediaan	C.3	720.000,00	3.061.050,00
Jumlah Aset Lancar		1.063.790.024,00	522.186.718,00
ASET TETAP			
Tanah	C.4	2.380.363.000,00	2.380.363.000,00
Peralatan dan Mesin	C.5	8.184.373.225,00	7.293.603.369,00
Gedung dan Bangunan	C.6	231.692.000,00	231.692.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.7	8.000.000,00	8.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	-5.643.598.270,00	-4.695.447.276,00
Jumlah ASET TETAP		5.160.829.955,00	5.218.211.093,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.9	599.020.000,00	391.200.000,00
Aset Lain-Lain	C.10	749.578.300,00	553.954.500,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.11	-1.197.541.800,00	-787.407.356,00
Jumlah Aset Lainnya		151.056.500,00	157.747.144,00
JUMLAH ASET		6.375.676.479,00	5.898.144.955,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	2.855.474,00	39.399.737,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.855.474,00	39.399.737,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.855.474,00	39.399.737,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	6.372.821.005,00	5.858.745.218,00
JUMLAH EKUITAS		6.372.821.005,00	5.858.745.218,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.375.676.479,00	5.898.144.955,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	139.142,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		139.142,00	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	13.639.553.548,00	12.315.944.470,00
Beban Persediaan	D.3	28.995.450,00	40.540.750,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	27.688.571.639,00	21.821.600.258,00
Beban Pemeliharaan	D.5	1.271.905.473,00	590.743.121,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	16.915.907.037,00	7.029.430.798,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.347.999.455,00	1.135.832.019,00
JUMLAH BEBAN		60.892.932.602,00	42.934.091.416,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-60.892.793.460,00	-42.934.091.416,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	41,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		41,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		41,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-60.892.793.419,00	-42.934.091.416,00
POS LUAR BIASA	D.9	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	D.10	-60.892.793.419,00	-42.934.091.416,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1	5.858.745.218,00	23.900.235.785,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-60.892.793.419,00	-42,934,091,416,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		-96.235.713.00	-7.754.578.200,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	61.503.104.919,00	32.647.179.049,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	514.075.787.00	-18.041.490.567,00
EKUITAS AKHIR	E.5	6.372.812.005,00	5.858.745.218,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 19. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-27/PB/PB.6/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.
 20. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 23 Desember 2020.

Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu **A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan

Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
2. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Lampung;
3. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan; perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
4. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
6. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
7. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung mempunyai wewenang:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
2. Mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu

Provinsi;

3. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
4. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi.

Sejalan dengan Visi Bawaslu 2019 – 2024 “***Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya***”, Sekretariat Bawaslu Lampung ikut melaksanakan Misi Bawaslu berupa:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan satuan kerja yang dikelola oleh Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Satuan Kerja.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan MonSAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

*Basis
Akuntansi*

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 *unaudited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- c. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (SPHL/SP3HL).
- e. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Belanja disajikan dalam LRA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa uang pengganti perkara tindak pidana korupsi harus disetorkan selain ke kas negara (kas daerah/BUMN/BUMD) maka tagihan uang pengganti tersebut tidak disajikan pada pos aset lancar di neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- 3) Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria aset tetap walaupun dibeli dari MAK yang bukan peruntukannya, maka barang-barang tersebut tetap dibukukan sesuai dengan substansinya (substance over form).
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas, dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 14 Kali. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang diambil oleh pimpinan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Bawaslu Provinsi Lampung selama tahun 2022, serta perlunya revisi dalam hal pemuthakiran Halaman 3 DIPA.

Tabel 3. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2022

No	Revisi	Tanggal Revisi	Jumlah Pagu	Keterangan Revisi
1	0 (awal)	17 November 2021	42.778.620.000	-
2	1 (DJA)	9 Desember 2021	42.778.620.000	Revisi Pencadangan Anggaran
3	2 (Kanwil)	16 Februari 2022	42.778.620.000	Revisi Pagu Minus
4	3 (Kanwil)	11 April 2022	42.778.620.000	Revisi halaman 3 DIPA untuk Triwulan I Tahun 2022 dan dalam rangka Pemutakhiran Data POK
5	4 (Kanwil)	12 Mei 2022	42.778.620.000	Revisi Halaman 3 DIPA untuk Bulan April berdasar Surat KPPN Nomor S-1065/KPN.0801/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan Data Capaian Output Periode Triwulan I 2022, Pemutakhiran Halaman III DIPA, dan Pengaturan Penilaian IKPA Periode Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri 2022
6	5 (Kanwil)	5 Juli 2022	42.778.620.000	Revisi Halaman 3 DIPA untuk Bulan April berdasar Surat KPPN Nomor S-1065/KPN.0801/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan Data Capaian Output Periode Triwulan I 2022, Pemutakhiran Halaman III DIPA
7	6 (DJA)	11 Agustus 2022	42.355.265.000	Revisi pengurangan pagu dikarenakan Kota Bandar Lampung telah menjadi satker baru dan memiliki DIPA yang terpisah dari DIPA Provinsi Lampung
8	7 (DJA)	8 September 2022	60.425.274.000	Penambahan Anggaran
9	8 (Kanwil)	13 September 2022	61.070.599.000	Penambahan Pagu Hibah Non Pilkada
10	9 (DJA)	11 Oktober 2022	68.257.043.000	Revisi Anggaran Belanja Tambahan Tahap II

No	Revisi	Tanggal Revisi	Jumlah Pagu	Keterangan Revisi
11	10 (DJA)	03 November 2022	68.257.043.000	Revisi Anggaran Belanja Tambahan Tahap II
12	11 (DJA)	28 November 2022	68.257.043.000	Revisi Pergeseran Anggaran Antar KRO (Pemenuhan Kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas)
13	12 (KPA)	20 Desember 2022	68.257.043.000	Revisi Pemutakhiran Operasional Kegiatan Pergeseran Anggaran Dalam Komponen Yang Sama
14	13 (KPA)	27 Desember 2022	68.257.043.000	Revisi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai
15	14 (Kanwil)	17 Januari 2023	68.107.043.000	Pengurangan Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Kabupaten Pesisir Barat Dikarenakan Dibatalkannya Pemberian Dana Hibah Oleh Pemda Kabupaten Pesisir Barat

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 4. Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Tahun 2022

Uraian	2022	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan:		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Belanja:		
Belanja Pegawai	12.795.832.000	14.248.094.000
Belanja Barang	29.115.288.000	52.949.749.000
Belanja Modal	867.500.000	909.200.000
Jumlah Belanja	42.778.620.000	68.107.043.000

Berikut Pagu Anggaran pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022:

Tabel 5. Pagu Anggaran pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Pagu
1	Bawaslu Provinsi Lampung	16.584.317.000
2	Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	3.997.275.000
3	Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	4.499.505.000
4	Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	4.403.276.000
5	Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	3.173.569.000
6	Bawaslu Kabupaten Pesawaran	3.831.497.000
7	Bawaslu Kabupaten Way Kanan	3.842.706.000
8	Bawaslu Kota Bandar Lampung	1.310.973.000
9	Bawaslu Kota Metro	2.896.709.000
10	Bawaslu Kabupaten Pringsewu	3.037.079.000
11	Bawaslu Kabupaten Tanggamus	3.927.758.000
12	Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	3.384.468.000
13	Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	4.196.974.000
14	Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	2.906.018.000
15	Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	3.223.006.000
16	Bawaslu Kabupaten Mesuji	2.891.913.000
Total		68.107.043.000

Berikut rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022:

Tabel 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022

No.	Kode Output	Nama RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu			
	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12.139.088.000	10.578.744.622	87%
	UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	151.210.000	126.775.000	84%
2	6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu			
	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9.437.830.000	7.868.801.946	83%
3	6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc			
	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	9.732.494.000	9.151.041.144	94%
Jumlah			31.460.622.000	27.725.362.712	88%

*Realisasi
Pendapatan
Rp135,96
Ribu*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp135.960,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp135.960,00 yang berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp135.919,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu tahun 2021 sebesar Rp41,00. Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 100% dibanding tahun sebelumnya.

Perbandingan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	135.919	11.222.910	-100%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	41	55.000.500	-100%
Jumlah	135.960	66.223.410	-100%

Realisasi Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung per 31 Desember 2022 sebesar Rp135.960,00 yang berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp135.919,00 yang terdiri dari:

Tabel 8. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Bunga Rekening Giro Rekening Hibah Non Pilkada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	F08E58N 3E1JRT99 67	20 Desember 2022	498
2	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Tulang Bawang	F08E58N 3E1JJRT9 67	30 November 2022	2.985

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
3	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Lampung Utara	2122733C IF22DCF 9P	20 Oktober 2022	33.069
4	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Pringsewu	4341E55 DENAA9 AIF	24 November 2022	3.014
5	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Tulang Bawang	F08E58N 3E1JJRT9 67	30 November 2022	55.257
6	Jasa Giro Hibah Non Pilkada Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	2122733C IF22DCF 9P	20 Oktober 2022	41.096
Jumlah				135.919

Selanjutnya Rp41,00 merupakan PNPB yang diperoleh dari Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dari Belanja Pembulatan Gaji PNS atas Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji PNS Bulan Desember tahun 2021 dengan nomor SPM 00011 dan nomor SP2D 220171301000390.

*Realisasi
Belanja
Rp60,98
Miliar*

B.2 Belanja

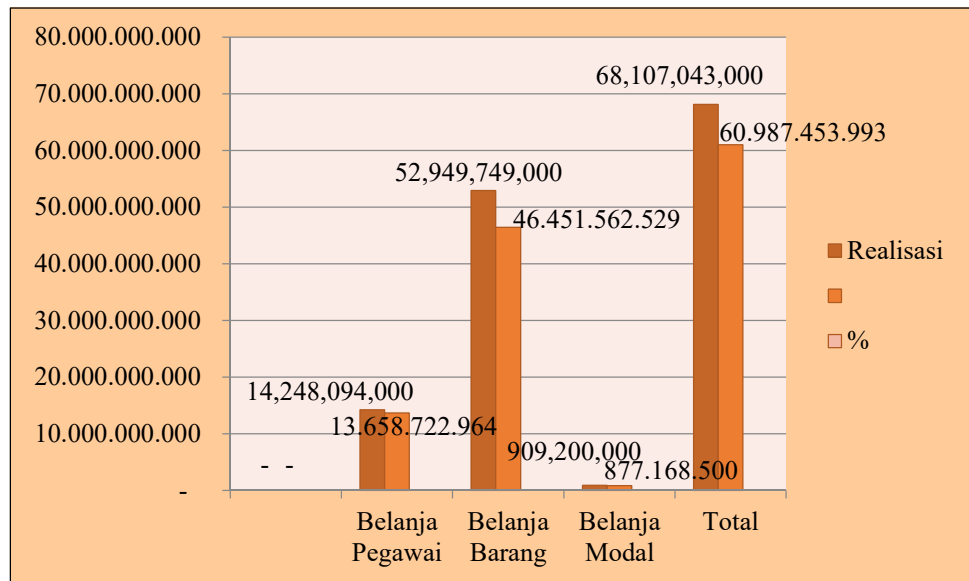
Realisasi Belanja Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp60.987.453.993,00 atau 90% dari anggaran belanja sebesar Rp68.107.043.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	14.248.094.000	13.669.923.915	96%
Belanja Barang	52.949.749.000	46.459.827.067	88%
Belanja Modal	909.200.000	877.168.500	96%
Total Belanja Kotor	68.107.043.000	61.006.919.482	90%
Pengembalian Belanja	0	19.465.489	100%
Total	68.107.043.000	60.987.453.993	90%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA T.A. 2022



Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021, Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 44%.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Pegawai	13.658.722.964	12.296.775.054	11%
Belanja Barang	46.451.562.529	29.635.950.976	57%
Belanja Modal	877.168.500	551.392.000,00	59%
Total	60.987.453.993	42.484.118.030	44%

Secara umum terdapat kenaikan belanja per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, yang disebabkan antara lain:

1. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan

sebesar 11% dibandingkan per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan terdapat penambahan pegawai PNS di Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung yang terdiri dari 10 CPNS Organik baru Angkatan 2022 di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dengan rincian: 3 CPNS berada di Bawaslu Provinsi Lampung, 4 CPNS berada di Bawaslu Kota Bandar Lampung dan 3 CPNS berada di Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

2. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 57% dibandingkan per 30 Desember 2021. Hal ini dikarenakan adanya pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Provinsi Lampung, sehingga terjadi penambahan beban anggaran pada belanja barang.
3. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 59% dibandingkan per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan adanya pengadaan fasilitas perkantoran untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang lebih besar pada tahun 2022 daripada tahun 2021 seperti pembelian *scanner, proyektor, genset, pc, printer, dan laptop*.

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp60.987.453.993,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp61.006.919.482,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp19.465.489,00. Pengembalian belanja sebesar Rp19.465.489,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang berasal dari Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119), Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123), Belanja Tunjangan Umum PNS (511151).

Rincian pengembalian belanja perjalanan biasa (524111) adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa Per 31 Desember 2022

Rincian Pengembalian Belanja				
No	Keterangan	NTPN	Tgl Setor	Jumlah
1	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Rosa Septiawan	DC59945IPS DJKK2O	15 Desember 2022	950.000

No	Keterangan	NTPN	Tgl Setor	Jumlah
2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Hermansyah, Tyas Woroasih dan Dirga Santosa	4ECCB5209 N001M8F	15 Desember 2022	600.000
3	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Fatikhatul Khoiriyah	689877N8P6 N58NI4	15 Desember 2022	997.998
4	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Harian dan Hotel a.n Fatikhatul Khoiriyah	DB53D5209 N001N99	15 Desember 2022	1.553.660
5	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBM a.n Widodo Wuryanto	8BA7C0JSQI 420IV0	15 Desember 2022	300.000
6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Transport a.n Widodo Wuryanto	E8ED96QR9 C4OROAF	15 Desember 2022	200.000
7	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBM/Transport a.n Widodo Wuryanto	68D7D5UD9 HICEM44	15 Desember 2022	204.980
8	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Iskardo P Panggar	CFEB5395A 1R77O43	15 Desember 2022	1.185.800
9	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penginapan di Lampung Utara a.n Hermansyah, Erwin, Eviyatun, Dirga	52D200JSQI 420NPM	15 Desember 2022	200.000
10	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBM/Transport a.n Widodo Wuryanto	32EF15209N 001JB1	15 Desember 2022	204.980
11	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel Way Kanan a.n Tamri Suhaimi	73F755UDP HICERV0	15 Desember 2022	400.000
12	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel Way Kanan a.n Haris, Theresia dan Yanuar	F67A07N8P6 N58O1O	15 Desember 2022	720.000
13	Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas	1637F45IPS DIO6L6	15 Desember 2022	552.100
Jumlah				8.264.538

Selanjutnya, berikut rincian pengembalian belanja pegawai per 31 Desember 2022:

Tabel 12. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022

Rincian Pengembalian Belanja				
No	Keterangan	SP2D	Tgl Setor	Jumlah
1	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji PNS Bulan Desember tahun 2021 dan Januari tahun 2022 untuk 7 pegawai/ 10 jiwa sesuai nomor gaji 000345 tanggal 19 januari 2022	22017130100 0390	26/01/2022	41

No	Keterangan	SP2D	Tgl Setor	Jumlah
2	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji Berkala PNS Bulan Mei tahun 2022 untuk 3 pegawai/ 12 jiwa sesuai nomor gaji 000368 tanggal 12 Mei 2022	22017130100 7961	19/05/2022	138
3	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji Kenaikan Pangkat PNS Bulan September tahun 2022 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa sesuai nomor gaji 000378 tanggal 8 September 2022	22017130100 9896	13/06/2022	12
4	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Juli s.d September Tahun 2022 untuk 5 pegawai/14 jiwa sesuai nomor gaji 000393 tanggal 08 September 2022	22017130101 7331	12/09/2022	520
5	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Juli s.d September Tahun 2022 untuk 5 pegawai/14 jiwa sesuai nomor gaji 000393 tanggal 08 September 2022	22017130101 7331	12/09/2022	3.240.000
6	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Juli s.d September Tahun 2022 untuk 5 pegawai/14 jiwa sesuai nomor gaji 000393 tanggal 08 September 2022	22017130101 7331	12/09/2022	1.480.000
7	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Januari s.d Juni dan Kekurangan gaji Bulan Oktober s.d November Tahun 2022 untuk 4 pegawai/12 jiwa sesuai nomor gaji 000398 tanggal 7 November 2022	22017130102 2285	10/11/2022	240
8	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Januari s.d Juni dan Kekurangan gaji Bulan Oktober s.d November Tahun 2022 untuk 4 pegawai/12 jiwa sesuai nomor gaji 000398 tanggal 7 November 2022	22017130102 2285	10/11/2022	6.480.000
Jumlah				11.200.951

*Belanja
Pegawai
Rp13,65
Miliar*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 13.658.722.964,00 atau 96% dari anggaran belanja pegawai sebesar 14.248.094.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.399.337.000	2.092.587.874	87%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	10.298.934.000	10.245.184.400	99%
Belanja Lembur	153.648.000	35.274.000	23%
Belanja Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	1.396.175.000	1.296.877.641	93%
Jumlah Belanja Kotor	14.248.094.000	13.669.923.915	96%
Pengembalian Belanja Pegawai	0	11.200.951	100%
Total	14.248.094.000	13.658.722.964	96%

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.658.722.964,00 dan Rp12.296.775.054,00 atau terjadi peningkatan sebesar 96%. Hal ini disebabkan terdapat beberapa perubahan status dari pegawai PNS di Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung yang terdiri dari:

- a. Terdapat penambahan pegawai PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung yang terdiri dari 10 CPNS Organik baru Angkatan 2022 di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dengan rincian: 3 CPNS berada di Bawaslu Provinsi Lampung, 4 CPNS berada di Bawaslu Kota Bandar Lampung dan 3 PNS berada di Bawaslu Kabupaten Pesawaran.
- b. Tunjangan Kinerja bisa dibayarkan sebesar 50% untuk PNS Bawaslu Provinsi Lampung pada saat pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- c. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pejabat struktural eselon II, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Lampung; dan
- d. Kenaikan pangkat dari II/d ke III/a pada 2 orang pegawai Sekretariat Provinsi Bawaslu Lampung pada bulan Oktober 2022.

**Tabel 14. Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.092.587.874	1.282.126.110	63%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	10.245.184.400	10.075.169.900	2%
Belanja Lembur	35.274.000	52.722.850	-33%
Belanja Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	1.296.877.641	888.042.087	46%
Jumlah Belanja Kotor	13.669.923.915	12.298.060.947	11%
Pengembalian Belanja Pegawai	11.200.951	1.285.893	771%
Total	13.658.722.964	12.296.775.054	11%

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.658.722.964,00 seluruhnya berasal dari APBN yang dipergunakan untuk:

- a. Pembayaran Gaji PNS serta Uang Makan PNS bulan Januari s.d. Desember 2022;
- b. Pembayaran Tunjangan Struktural dan Fungsional bulan Januari s.d. Desember 2022;
- c. Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Bawaslu bulan Januari s.d. Desember 2022;
- d. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur di Bawaslu Provinsi untuk bulan Januari s.d. Desember 2022;
- e. Belanja Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi bulan Januari s.d. Desember 2022;
- f. Pembayaran Gaji ke-13 dan THR PNS tahun 2022 dan;
- g. Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Uang Kehormatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Belanja Pegawai sebesar Rp13.658.722.964,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp13.669.923.915,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp11.200.951,00. Pengembalian belanja sebesar Rp11.200.951,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang berasal dari

Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119), Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123), Belanja Tunjangan Umum PNS (511151).

Pengembalian belanja merupakan Pengembalian atas belanja tahun anggaran yang berjalan disetor menggunakan potongan SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 15. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022**

Rincian Pengembalian Belanja				
No	Keterangan	SP2D	Tgl Setor	Jumlah
1	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji PNS Bulan Desember tahun 2021 dan Januari tahun 2022 untuk 7 pegawai/ 10 jiwa sesuai nomor gaji 000345 tanggal 19 januari 2022	220171301000 390	26/01/2022	41
2	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji Berkala PNS Bulan Mei tahun 2022 untuk 3 pegawai/ 12 jiwa sesuai nomor gaji 000368 tanggal 12 Mei 2022	220171301007 961	19/05/2022	138
3	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji Kenaikan Pangkat PNS Bulan September tahun 2022 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa sesuai nomor gaji 000378 tanggal 8 September 2022	220171301009 896	13/06/2022	12
4	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Juli s.d September Tahun 2022 untuk 5 pegawai/14 jiwa sesuai nomor gaji 000393 tanggal 08 September 2022	220171301017 331	12/09/2022	520
5	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Juli s.d September Tahun 2022 untuk 5 pegawai/14 jiwa sesuai nomor gaji 000393 tanggal 08 September 2022	220171301017 331	12/09/2022	3.240.000
6	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Juli s.d September Tahun 2022 untuk 5 pegawai/14 jiwa sesuai nomor gaji 000393 tanggal 08 September 2022	220171301017 331	12/09/2022	1.480.000
7	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Januari s.d Juni dan Kekurangan gaji Bulan Oktober s.d November Tahun 2022 untuk 4 pegawai/12 jiwa sesuai nomor gaji 000398 tanggal 7 November 2022	220171301022 285	10/11/2022	240

No	Keterangan	SP2D	Tgl Setor	Jumlah
8	Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan Januari s.d Juni dan Kekurangan gaji Bulan Oktober s.d November Tahun 2022 untuk 4 pegawai/12 jiwa sesuai nomor gaji 000398 tanggal 7 November 2022	220171301022 285	10/11/2022	6.480.000
Jumlah				11.200.951,00

*Belanja
Barang
Rp46,45
Miliar*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp46.451.562.529,00 atau 88% dari anggaran belanja barang sebesar Rp52.949.749.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	18.833.659.000	17.152.855.805	91%
Belanja Barang Non Operasional	5.252.024.000	4.351.747.920	83%
Belanja Persediaan	28.700.000	26.654.400	93%
Belanja Jasa	7.294.791.000	6.730.851.894	92%
Belanja Pemeliharaan	1.622.736.000	1.271.904.473	78%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	19.917.839.000	16.925.811.575	85%
Jumlah Belanja Kotor	52.949.749.000	46.459.827.067	88%
Pengembalian Belanja	0	8.264.538	100%
Total	52.949.749.000	46.451.562.529	88%

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp46.451.562.529,00 dan Rp29.635.950.976,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 88% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021. Rincian Belanja Barang per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 17. Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	17.152.855.805	16.380.153.589	5%
Belanja Barang Non Operasional	4.351.747.920	2.616.389.121	66%
Belanja Persediaan	26.654.400	38.464.300	-31%
Belanja Jasa	6.730.851.894	2.995.102.647	125%
Belanja Pemeliharaan	1.271.905.473	590.743.121	115%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16.925.811.575	7.027.790.798	141%
Jumlah Belanja Kotor	46.459.827.067	29.648.643.576	57%
Pengembalian Belanja	8.264.538	12.692.600	-35%
Total	46.451.562.529	29.635.950.976	57%

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 57% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021, disebabkan oleh adanya tambahan anggaran belanja barang sebesar Rp23.834.461.000,00 yang semula pagu anggaran Rp29.115.288.000,00 bertambah menjadi Rp52.949.749.000,00.

Dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.418.141.939,00 berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) dan Rp1.033.420.590,00 berasal dari sumber hibah langsung dalam negeri (HDN).

B.4.1 Belanja Barang (Rupiah Murni)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp45.418.141.939 dan Rp19.601.980.405.

**Tabel 18. Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021**

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Keperluan Perkantoran	16.073.286.732	9.887.375.701	63%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.155.999	5.478.500	-24%

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	679.932.000	634.864.000	7%
Belanja Barang Operasional Lainnya	300.308.000	108.796.968	176%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	95.173.074	391.792.060	-76%
Belanja Bahan	2.587.967.920	644.813.721	301%
Belanja Honor Output Kegiatan	1.416.550.000	14.400.000	9737%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	347.230.000	114.973.500	202%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26.334.400	28.864.300	-9%
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	320.000	9.600.000	-97%
Belanja Langganan Listrik	385.618.028	274.250.459	41%
Belanja Langganan Telepon	61.840.961	46.643.168	33%
Belanja Langganan Air	21.066.760	7.856.580	168%
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16.529.555	-	100%
Belanja Sewa	4.561.530.000	2.056.420.000	122%
Belanja Jasa Profesi	797.600.000	102.800.000	676%
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	840.000	48.742.000	-98%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	296.597.480	12.910.000	2197%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	827.713.993	518.200.121	60%
Belanja Perjalanan Biasa	6.700.899.216	3.400.085.874	97%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	961.867.500	33.850.000	2742%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.934.555.000	1.271.956.053	524%

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.328.489.859	-	100%
Jumlah Belanja Kotor	45.426.406.477	19.614.673.005	132%
Pengembalian Belanja	8.264.538	12.692.600	-35%
Total	45.418.141.939	19.601.980.405	132%

Realisasi Belanja Barang digunakan untuk:

1. Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
2. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
3. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
4. Fasilitasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi;
5. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
6. Pengawasan Pemilu Partisipatif Provinsi dan Kab/Kota;
7. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
8. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi;
9. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
10. Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Provnsi dan Kab/Kota;
11. Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
12. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
13. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi;
14. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi;
15. Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Bawaslu Provinsi;
16. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi Bawaslu

- Provinsi dan Kab/Kota;
17. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
 18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
 19. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota;
 20. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting Bawaslu Provinsi;
 21. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota.

Pada realisasi belanja barang (RM) sebesar Rp45.418.141.939,00 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 senilai Rp96.333.074,00 dari jumlah pagu Rp229.910.000,00.

Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Rupiah Murni per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	227.360.000	95.173.074	42%
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.500.000	320.000	21%
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.050.000	840.000	80%
Jumlah Kotor	229.910.000	96.333.074	42%
Pengembalian Belanja	0	0	0%
Jumlah	229.910.000	96.333.074	42%

Belanja barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 penggunaannya terbagi dalam:

Tabel 20. Rincian Penggunaan Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

No	Akun
1	521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19
	- Cairan Disinfektan - Paket Data - Lisensi Zoom - Penambah Dayat Tahan Tubuh (Vitamin)
2	521841 - Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19
	- Hand Sanitiser
3	522192 - Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
	- Rapid Test Antigen

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.033.420.590,00 dan Rp10.033.970.571,00.

Tabel 21. Perbandingan Belanja Barang HDN per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Keperluan Perkantoran	0	5.175.318.860	-100%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	176.527.500	-100%
Belanja Bahan	0	1.051.976.900	-100%
Belanja Honor Output Kegiatan	0	782.450.000	-100%
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	7.775.000	-100%
Belanja Langganan Listrik	0	89.942.320	-100%
Belanja Langganan Telepon	0	8.418.120	-100%
Belanja Langganan Air	0	3.070.000	-100%
Belanja Sewa	885.826.590	325.760.000	172%
Belanja Jasa Profesi	0	30.600.000	-100%
Belanja Jasa Lainnya	0	600.000	-100%

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147.594.000	59.633.000	148%
Belanja Perjalanan Biasa	0	2.151.378.871	-100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	170.520.000	-100%
Jumlah Belanja Kotor	1.033.420.590	10.033.970.571	-90%
Pengembalian Belanja	0	0	0%
Total	1.033.420.590	10.033.970.571	-90%

Realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp1.033.420.590,00 digunakan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja sewa berupa sewa kendaraan pada Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan.

*Belanja
Modal
Rp877,16
Juta*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp877.168.500,00 atau 96% dari anggaran belanja sebesar Rp909.200.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022

Uraian	2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	667.800.000	640.568.500	96%
Belanja Modal Lainnya	241.400.000	236.600.000	98%
Total	909.200.000	877.168.500	96%

Realisasi Belanja Modal sebesar sebesar Rp877.168.500,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp877.168.500,00 dan Rp551.392.000,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 59% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan adanya kenaikan terhadap pengadaan barang yang menghasilkan aset dalam rangka pengembangan struktur organisasi Bawaslu Provinsi Lampung serta adanya penambahan pegawai.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	640.568.500	224.000.000	186%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		231.692.000	-100%
Belanja Modal Lainnya	236.600.000	95.700.000	147%
Total	877.168.500	551.392.000	59%

*Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp640,56
Juta*

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp640.568.500,00 dan Rp224.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 186% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	640.568.500	224.000.000	186%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	640.568.500	224.000.000	186%
Pengembalian	0	0	0%
Jumlah Belanja	640.568.500	224.000.000	186%

Realisasi digunakan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran untuk Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 25. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022**

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah
				(Rp)
1	3050204004	A.C. Split	2	9.700.000
2	3050105015	Alat Penghancur Kertas	13	44.250.000
3	3060102128	Camera Digital	14	91.000.000
4	3050201003	Kursi Besi/Metal	20	19.992.000
5	3100102002	Lap Top	3	39.000.000
6	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	79.760.000
7	3050204001	Lemari Es	1	1.950.000
8	3050201008	Meja Rapat	1	40.000.000
9	3100102001	P.C Unit	10	111.800.000
10	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	32.500.000
11	3100204002	Router	2	3.900.000
12	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	42.000.000
13	3050201005	Sice	1	1.999.000
14	3050206002	Televisi	1	5.800.000
15	3010304001	Transportable Generating Set	7	116.917.500
Jumlah			97	640.568.500

Penjelasan peruntukan Belanja Modal Peralatan Mesin Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

1. P.C unit sebanyak 9 unit untuk Bawaslu Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Tulang Bawang, Kab, Way Kanan dan Kab. Pesisir Barat.
2. Printer sebanyak 9 untuk Bawaslu Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Tulang Bawang, Kab, Way Kanan dan Kab. Pesisir Barat.
3. Scanner sebanyak 7 unit untuk Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulag Bawang Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Mesuji
4. Transportable Generating Set sebanyak 7 unit untuk Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat,

Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulag Bawang Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Mesuji

5. LCD Projector/Infocus sebanyak 15 unit untuk 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
6. Alat Penghancur Kertas sebanyak 15 unit untuk 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
7. Kamera Digital sebanyak 14 unit untuk 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

*Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,00*

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp231.692.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Des 2022	Realisasi 31 Des 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	231.692.000	-100%
Jumlah Belanja Kotor	0	231.692.000	-100%
Pengembalian	0	0	0%
Jumlah Belanja	0	231.692.000	-100%

*Belanja
Modal
Lainnya
Rp236,60
Juta*

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp236.600.000,00 dan Rp95.700.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 147% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Modal Lainnya	236.600.000	95.700.000	147%
Jumlah Belanja Kotor	236.600.000	95.700.000	147%
Pengembalian	0	0	0%
Jumlah Belanja	236.600.000	95.700.000	147%

Belanja Modal lainnya Bawaslu Provinsi Lampung sebesar Rp236.600.000,00 merupakan Pengembangan Software berupa website Utama dan PPID Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Pengembangan Software Komputer (Website)

No	Nama Barang	Merk Tipe/ Alamat ID	Nilai (Rp)
1.	Software Komputer	Website Bawaslu Kota Metro/ https://metro.bawaslu.go.id https://ppid.metro.bawaslu.go.id	14.800.000
2.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pesisir Barat/ https://pesbar.bawaslu.go.id https://ppid.pesbar.bawaslu.go.id	14.800.000
3.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pringsewu/ https://pringsewu.bawaslu.go.id https://ppid.pringsewu.bawaslu.go.id	14.800.000
4.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pesawaran/ https://pesawaran.bawaslu.go.id https://ppid.pesawaran.bawaslu.go.id	14.800.000
5.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tanggamus/ https://tanggamus.bawaslu.go.id https://ppid.tanggamus.bawaslu.go.id	14.800.000
6.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Selatan/ https://lamsel.bawaslu.go.id https://ppid.lamsel.bawaslu.go.id	14.800.000
7.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Tengah/ https://lamteng.bawaslu.go.id https://ppid.lamteng.bawaslu.go.id	14.800.000
8.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Mesuji/ https://mesuji.bawaslu.go.id https://ppid.mesuji.bawaslu.go.id	14.800.000
9.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tulang Bawang/ https://tuba.bawaslu.go.id https://ppid.tuba.bawaslu.go.id	14.800.000

No	Nama Barang	Merk Tipe/ Alamat ID	Nilai (Rp)
10.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat/ https://tubaba.bawaslu.go.id https://ppid.tubaba.bawaslu.go.id	14.800.000
11.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Barat/ https://lambar.bawaslu.go.id https://ppid.lambar.bawaslu.go.id	14.800.000
12.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Way Kanan/ https://waykanan.bawaslu.go.id https://ppid.waykanan.bawaslu.go.id	14.800.000
13.	Software Komputer	Website Bawaslu Kota Bandar Lampung/ https://balam.bawaslu.go.id	7.400.000
14.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Utara/ https://lampura.bawaslu.go.id https://ppid.lampura.bawaslu.go.id	14.800.000
15.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Timur/ https://lamtim.bawaslu.go.id https://ppid.lamtim.bawaslu.go.id	14.800.000
16.	Software Komputer	Website Bawaslu Provinsi Lampung https://lampung.bawaslu.go.id	22.000.000
Jumlah			236.600.000

B. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya
Dan Setara
Kas
Rp3.223,00*

C. 1 Kas Lainnya Dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.223,00 dan Rp9.000,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.223	9.000
2	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Total		0	9.000

Saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran senilai Rp3.223,00 merupakan saldo rekening hibah pilkada tahun 2017 yang ditutup tahun 2023. Selanjutnya, telah dilakukan penutupan atas rekening RPL 017 Panwas Kab. Lampung Utara UTK PS dengan nomor rekening 015501001965309 pada Bank Rakyat Indonesia KC Kotabumi pada tanggal 24 Maret 2023.

C. 2 Belanja Dibayar Dimuka

*Belanja
Dibayar
Dimuka
Rp1,06
Miliar*

Belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.063.066.801,00 dan Rp519.116.668,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 30. Perbandingan Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Sewa Dibayar Dimuka	1.063.066.801	519.116.668
Total		1.063.066.801	519.116.668

Tabel 31. Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022

No	Bawaslu Provinsi/Kabupaten	Nama Sewa	Jumlah
1	Kota Metro	Sewa Gedung	15.000.000
2	Kab. Lampung Tengah	Sewa Gedung	17.500.000
3	Kab. Lampung Utara	Sewa Gedung	46.666.667
4	Kab. Lampung Barat	Sewa Gedung	35.000.000
5	Kab. Tulang Bawang	Sewa Gedung	29.166.667
6	Kab. Tanggamus	Sewa Gedung	46.666.667
7	Kab. Lampung Timur	Sewa Gedung	39.666.667
8	Kab. Way Kanan	Sewa Gedung	46.566.667
9	Kab. Pesawaran	Sewa Gedung	34.000.000
10	Kab. Pringsewu	Sewa Gedung	23.333.333
11	Kab. Mesuji	Sewa Gedung	17.500.000
12	Kab. Tulang Bawang Barat	Sewa Gedung	29.166.667
13	Kab. Pesisir Barat	Sewa Gedung	5.833.333
14	Provinsi Lampung	Sewa Gedung	349.000.000
15	Provinsi Lampung	Sewa Gedung	19.250.000
16	Kab. Pringsewu	Sewa Kendaraan (Dana Hibah)	27.777.778
17	Kab. Lampung Utara	Sewa Kendaraan (Dana Hibah)	51.060.000
18	Kota Metro	Sewa Kendaraan (Dana Hibah)	76.490.100
19	Kab. Tulang Bawang	Sewa Kendaraan (Dana Hibah)	52.597.350
20	Kab. Lampung Timur	Sewa Kendaraan (Dana Hibah)	25.624.905
21	Kab. Lampung Selatan	Sewa Kendaraan (Dana Hibah)	75.200.000
Jumlah			1.063.066.801

*Persediaan
Rp720,00
Ribu*

C. 3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp720.000,00 dan Rp3.061.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Barang Konsumsi	720.000	3.061.050
Total	720.000	3.061.050

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Persediaan Bawaslu Provinsi Lampung Per 31 Desember 2022 Nomor : 007/PL.07/LA/01/2023 tanggal 12 Desember 2022, Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022

No	Kode	Uraian Barang Konsumsi	Nilai (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	110.000
2	1010301003	Penjepit Kertas	235.000
3	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	375.000
Jumlah			720.000

Mutasi nilai persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 34. Mutasi Nilai Persediaan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	3.061.050
Pembelian	26.654.400
Jumlah Mutasi Tambah	29.715.450
Pemakaian	28.995.450
Jumlah Mutasi Kurang	28.995.450
Saldo per 31 Desember 2022	720.000

Pembelian senilai Rp26.654.400,00 berasal dari belanja barang persediaan (521811) senilai Rp26.334.400,00 dan belanja barang persediaan penanganan Pandemi COVID-19 (521841) senilai Rp320.000,00.

*Tanah
Rp2,38
Milyar*

C. 4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Bawaslu per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.380.363.000,00 dan Rp2.380.363.000,00. Tidak terdapat penambahan nilai atas Tanah yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

**Tabel 35. Perbandingan Rincian Tanah
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	2.380.363.000	2.380.363.000
Total	2.380.363.000	2.380.363.000

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 36. Mutasi Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp	2.380.363.000
Mutasi tambah:		-
Mutasi kurang:		-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.380.363.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	2.380.363.000

Saldo tanah sebesar Rp2.380.363.000,00 merupakan perolehan aset yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bawaslu Provinsi Lampung berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 590/2434/11/2015 dan Nomor 256/Bawaslu-Lpg/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 590/2435/11/2015 dan Nomor 256/Bawaslu-Lpg/XII/2015 tanggal 18 Desember. Luas tanah adalah 1937 m² dan beralamat di desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nomor sertifikat adalah 00023 dan Nomor induk bangunan adalah 08.02.06.01.07639.

*Peralatan
dan mesin
Rp8,18
Milyar*

C. 5 Peralatan Dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.184.373.225,00 dan Rp7.446.808.569,00.

Tabel 37. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Peralatan Mesin	8.184.373.225	7.446.808.569
Total	8.184.373.225	7.446.808.569

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 38. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	7.293.603.369
Mutasi Tambah	
Pembelian	627.776.500
Hibah Masuk	584.798.956
Reklasifikasi Masuk	207.917.500
Jumlah Mutasi Tambah	1.420.492.956
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	126.181.800
Reklasifikasi Keluar	207.917.500
Penghentian Aset dari Penggunaan	195.623.800
Jumlah Mutasi Kurang	529.723.100
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	8.184.373.225
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(5.629.180.843)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2.555.192.382

Berikut rincian penjelasan Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin pada Bawaslu Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2022

- a. Pembelian sebesar Rp627.776.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 39. Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022**

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah
				(Rp)
1	3050204004	A.C. Split	2	9.700.000
2	3050105015	Alat Penghancur Kertas	13	44.250.000
3	3060102128	Camera Digital	14	91.000.000
4	3050201003	Kursi Besi/Metal	4	7.200.000
5	3100102002	Lap Top	3	39.000.000
6	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	79.760.000
7	3050204001	Lemari Es	1	1.950.000
8	3050201008	Meja Rapat	1	40.000.000
9	3100102001	P.C Unit	10	111.800.000
10	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	32.500.000
11	3100204002	Router	2	3.900.000
12	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	42.000.000
13	3050201005	Sice	1	1.999.000
14	3050206002	Televisi	1	5.800.000
15	3010304001	Transportable Generating Set	7	116.917.500
Jumlah			81	627.776.500

b. Hibah Masuk sebesar Rp584.798.956,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 40. Rincian Hibah Masuk Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022**

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	449.100.000	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan BAST Nomor 024/354/BA/Setda. III.08/2020 tanggal 7 September 2020 (Hibah TAYL)

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)	Keterangan
2	3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	4	135.698.956	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan 900/134/III.06/NP H/TUBABA/2022 tanggal 5 Oktober 2022
Jumlah			7	584.798.956	

- c. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp207.917.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah
				(Rp)
1	3060102128	Camera Digital	14	91.000.000
2	3010304001	Transportable Generating Set	7	116.917.500
Jumlah			21	207.917.500

- d. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp207.917.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah
				(Rp)
1	3090402031	Kamera Digital	14	91.000.000
2	3060347002	Genset	7	116.917.500
Jumlah			21	207.917.500

- e. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp195.623.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 43. Rincian Penghentian Aset Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022**

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah
				(Rp)
1	3050201002	Meja Kerja Kayu	1	1.320.000
2	3050201003	Kursi Besi/Metal	1	1.100.000
3	3050204004	A.C. Split	4	19.200.000
4	3050206046	Handy Cam	4	18.800.000
5	3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	2	3.960.000
6	3100102001	P.C Unit	6	55.758.300
7	3100102002	Lap Top	10	95.485.500
Jumlah			28	195.623.800

*Gedung dan
Bangunan
Rp231,69
Juta*

C. 6 Gedung Dan Bangunan

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp231.692.000,00 dan Rp231.692.000,00.

**Tabel 44. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Gedung dan Bangunan	231.692.000	231.692.000
Total	231.692.000	231.692.000

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	231.692.000
Mutasi Tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	231.692.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	6.950.760
Nilai Buku per 31 Desember 2022	224.741.240

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 merupakan Pagar Permanen senilai Rp231.692.000,00. Lokasi pembangunan berada di desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan Luas tanah adalah 1937 m². Nomor

sertifikat adalah 00023 dan Nomor induk bangunan adalah 08.02.06.01.07639.

*Jalan, irigasi
dan jaringan
Rp8,00 Juta*

C. 7 Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.000.000,00 dan Rp8.000.000,00. Tidak ada penambahan nilai atas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Bawaslu Provinsi Lampung. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Perbandingan Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021

Nama	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Jaringan	8.000.000	8.000.000
Total	8.000.000	8.000.000

Mutasi transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	8.000.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	8.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	7.466.667
Nilai Buku per 31 Desember 2022	533.333

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 terdiri dari instalasi lain-lain senilai Rp8.000.000,00.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp5,64
Milyar*

C. 8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.643.598.270 dan Rp4.695.447.276,00.

Tabel 48. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	5.629.180.843	4.686.197.022
2.	Gedung dan Bangunan	6.950.760	2.316.920
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.466.667	6.933.334
Total		5.643.598.270	4.695.447.276

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Tabel 49. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.184.373.225	5.629.180.843	2.555.192.382
2	Gedung dan Bangunan	231.692.000	6.950.760	224.741.240
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.000.000	7.466.667	533.333
Jumlah		8.424.065.225	5.643.598.270	2.780.466.955

C.9 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Rp599,02 Juta

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp599.020.000,00 dan Rp391.200.000,00.

Tabel 50. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Software	599.020.000	391.200.000
Total		599.020.000	391.200.000

Rincian lebih lanjut terkait mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 51. Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	391.200.000
Pembelian	122.000.000
Perolehan Lainnya	95.700.000
Pengembangan Nilai Aset	114.600.000
Koreksi Susulan	122.000.000
Jumlah Mutasi Tambah	454.300.000
Transfer Keluar	28.780.000
Koreksi Pencatatan	217.700.000
Jumlah Mutasi Kurang	246.480.000
Saldo per 31 Desember 2022	599.020.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	460.361.250
Nilai Buku per 31 Desember 2022	138.658.750

Penjelasan Mutasi Tambah

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tak berwujud sebagai berikut:

1. Pembelian sejumlah Rp122.000.000,00 merupakan pengembangan Software Komputer berupa website utama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang pada saat pendetailan seharusnya dicatat sebagai pengembangan namun terjadi kesalahan dalam pemilihan transaksi sehingga tercatat sebagai pembelian.
2. Perolehan Lainnya sejumlah Rp 95.700.000,00 merupakan transaksi yang disebabkan karena kesalahan dalam pelaksanaan koreksi pencatatan, sehingga Aset Tak Berwujud berupa Software sebanyak 15 Unit yang merupakan website PPID Bawaslu Kabupaten Kota perolehan tahun 2021 terhapus dari data barang. Berdasarkan arahan dari Bagian Keuangan, agar Software sebanyak 15 unit tersebut dicatat kembali menggunakan transaksi Perolehan Lainnya dengan dokumen dasar nomor 082/PL.07/LA/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Surat Keterangan Kesalahan Koreksi.
3. Pengembangan Nilai Aset sejumlah Rp114.600.000,00 merupakan transaksi pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Pengembangan Nilai Aset

No	Nama Barang	Merk Tipe/ Alamat ID	Nilai (Rp)
1.	Software Komputer	Website Bawaslu Kota Metro/ https://ppid.metro.bawaslu.go.id	7.400.000
2.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pesisir Barat/ https://ppid.pesbar.bawaslu.go.id	7.400.000
3.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pringsewu/ https://ppid.pringsewu.bawaslu.go.id	7.400.000
4.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pesawaran/ https://ppid.pesawaran.bawaslu.go.id	7.400.000
5.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tanggamus/ https://ppid.tanggamus.bawaslu.go.id	7.400.000
6.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Selatan/ https://ppid.lamsel.bawaslu.go.id	7.400.000
7.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Tengah/ https://ppid.lamteng.bawaslu.go.id	7.400.000
8.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Mesuji/ https://ppid.mesuji.bawaslu.go.id	7.400.000
9.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tulang Bawang/ https://ppid.tuba.bawaslu.go.id	7.400.000
10.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat/ https://ppid.tubaba.bawaslu.go.id	7.400.000
11.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Barat/ https://ppid.lambar.bawaslu.go.id	7.400.000
12.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Way Kanan/ https://ppid.waykanan.bawaslu.go.id	7.400.000
13.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Utara/ https://ppid.lampura.bawaslu.go.id	7.400.000
14.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Timur/ https://ppid.lamtim.bawaslu.go.id	7.400.000
15.	Software Komputer	Website Bawaslu Provinsi Lampung https://lampung.bawaslu.go.id	11.000.000
Jumlah			114.600.000

4. Koreksi Susulan sejumlah Rp122.000.000,00 merupakan tindak lanjut atas koreksi pencatatan transaksi pembelian sejumlah Rp122.000.000,00, yang merupakan pengembangan nilai aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Koreksi Susulan Pengembangan Nilai Aset

No	Nama Barang	Merk Tipe/ Alamat ID	Nilai (Rp)
1.	Software Komputer	Website Bawaslu Kota Metro/ https://metro.bawaslu.go.id	7.400.000
2.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pesisir Barat/ https://pesbar.bawaslu.go.id	7.400.000
3.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pringsewu/ https://pringsewu.bawaslu.go.id	7.400.000
4.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Pesawaran/ https://pesawaran.bawaslu.go.id	7.400.000
5.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tanggamus/ https://tanggamus.bawaslu.go.id	7.400.000
6.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Selatan/ https://lamsel.bawaslu.go.id	7.400.000
7.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Tengah/ https://lamteng.bawaslu.go.id	7.400.000
8.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Mesuji/ https://mesuji.bawaslu.go.id	7.400.000
9.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tulang Bawang/ https://tuba.bawaslu.go.id	7.400.000
10.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat/ https://tubaba.bawaslu.go.id	7.400.000
11.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Barat/ https://lambar.bawaslu.go.id	7.400.000
12.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Way Kanan/ https://waykanan.bawaslu.go.id	7.400.000
13.	Software Komputer	Website Bawaslu Kota Bandar Lampung/ https://balam.bawaslu.go.id	7.400.000
14.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Utara/ https://lampura.bawaslu.go.id	7.400.000
15.	Software Komputer	Website Bawaslu Kab. Lampung Timur/ https://lamtim.bawaslu.go.id	7.400.000
16.	Software Komputer	Website Bawaslu Provinsi Lampung https://lampung.bawaslu.go.id	11.000.000
Jumlah			122.000.000

Penjelasan Mutasi Kurang

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tak berwujud sebagai berikut:

1. Transfer Keluar sejumlah Rp28.780.000,00 tindak lanjut atas Pembentukan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung 419487 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-211/AG/AG.5/2022 tanggal 02 Juni 2022 hal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54. Transfer Keluar Aset Tak Berwujud

No	Nama Barang	Merk/Tipe/ Alamat ID	Nilai (Rp)
1	Software Komputer	Website Bawaslu Kota Bandar Lampung https://balam.bawaslu.go.id	22.400.000
2	Software Komputer	Website PPID Bawaslu Kota Bandar Lampung https://ppidbalam.bawaslu.go.id	6.380.000
Jumlah			28.780.000

2. Koreksi Pencatatan sejumlah Rp217.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Koreksi Pencatatan Aset Tak Berwujud

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Software Komputer	95.700.000	Kesalahan saat melakukan koreksi pencatatan sehingga Software Komputer sebanyak 15 unit yang merupakan Website PPID Bawaslu Kabupaten Kota perolehan tahun 2021 terhapus dari data barang
2	Software Komputer	122.000.000	Koreksi atas kesalahan pada saat pendetailan aset yang harusnya merupakan transaksi pengembangan atas website induk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dicatat sebagai transaksi pembelian
		217.700.000	

*Aset Lain-lain
Rp749,57
Juta*

C. 10 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp749.578.300,00 dan Rp553.954.500,00. Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dikarenakan dalam kondisi rusak berat. Rincian Aset lain-lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 56. Perbandingan Rincian Aset Lain-lain
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	749.578.300	553.954.500
Total	749.578.300	553.954.500

Tabel 57. Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan Per 31 Desember 2022

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah
				(Rp)
1	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1	7.000.000
2	3050105017	Mesin Absensi	2	6.100.000
3	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	5.850.000
4	3050201002	Meja Kerja Kayu	23	37.455.000
5	3050201003	Kursi Besi/Metal	66	40.091.000
6	3050201005	Sice	4	11.600.000
7	3050201008	Meja Rapat	22	31.640.000
8	3050201014	Meja Resepsionis	1	6.500.000
9	3050203999	Alat Pembersih Lainnya	2	1.095.000
10	3050204004	A.C. Split	8	35.120.000
11	3050204006	Kipas Angin	2	1.100.000
12	3050206002	Televisi	2	12.865.000
13	3050206031	Pataka	3	1.950.000
14	3050206046	Handy Cam	5	23.500.000
15	3060101036	Microphone/Wireless MIC	2	1.600.000
16	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	15.045.000
17	3060102128	Camera Digital	1	8.489.000
18	3060201003	Pesawat Telephone	1	1.884.300
19	3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	3	6.460.000
20	3100102001	P.C Unit	24	207.030.050
21	3100102002	Lap Top	19	181.535.500
22	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	78.218.450
23	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	22.315.000
24	3100204021	Kabel UTP	1	2.035.000
25	3190102001	Alat Tennis Meja	1	3.100.000
Jumlah			232	749.578.300

Adapun mutasi aset lain-lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 58. Mutasi Aset Lain-Lain

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	553.954.500
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	195.623.800
Jumlah Mutasi Tambah	195.623.800
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2022	749.578.300
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	737.180.550
Nilai Buku per 31 Desember 2022	12.397.750

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Lain-Lain berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke aset lainnya sebesar Rp195.623.800,00 merupakan reklasifikasi aset yang dihentikan dari penggunaan karena kondisi Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59. Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Per 31 Desember 2022

No	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Jumlah
				(Rp)
1	3050201002	Meja Kerja Kayu	1	1.320.000
2	3050201003	Kursi Besi/Metal	1	1.100.000
3	3050204004	A.C. Split	4	19.200.000
4	3050206046	Handy Cam	4	18.800.000
5	3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	2	3.960.000
6	3100102001	P.C Unit	6	55.758.300
21	3100102002	Lap Top	10	95.485.500
Jumlah			28	195.623.800

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset lainnya
Rp1,19
Milyar*

C. 11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.197.541.800,00 dan Rp787.407.356,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 60. Perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
A	Aset Tak Berwujud		
1	Software Komputer	460.361.250	258.206.250
	Jumlah	460.361.250	258.206.250
B	Aset Lain-Lain		
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	737.180.550	529.201.106
	Jumlah	737.180.550	529.201.106
	Total	1.197.541.800	787.407.356

Tabel 61. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	599.020.000	460.361.250	138.658.750
	Jumlah	599.020.000	460.361.250	138.658.750
B	Aset Lain-Lain			
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	749.578.300	737.180.550	12.397.750
	Jumlah	749.578.300	737.180.550	12.397.750
	Total	1.348.598.300	1.197.541.800	151.056.500

*Utang Pihak
Ketiga Rp2,85
Juta*

C. 12 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.855.474,00 dan Rp39.399.737,00 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Tabel 62. Perbandingan Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	19.169.416
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	2.855.474	20.221.321
Total		2.855.474	39.399.737

Rincian utang pihak ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022

No	Penerima	Untuk Pembayaran	Jumlah
1	Lampung Selatan	Air PAM	740.300
2	Lampung Selatan	Telpon	429.850
3	Tulang Bawang	Internet	535.800
4	Tulang Bawang	Listrik	649.524
5	Tulang Bawang	Telpon	500.000
Jumlah			2.855.474

*Ekuitas
Rp6,37 Miliar*

C. 13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.372.821.005,00 dan Rp5.858.745.218,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset senilai Rp6.375.676.479,00 dan kewajiban senilai Rp2.855.474,00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
Negara
Bukan Pajak
Rp139,14
Ribu*

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan negara bukan pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp139.142,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp139.142,00 yang berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp135.919,00 dan Pendapatan dari Penutupan Rekening sebesar Rp3.223,00.

Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung per 31 Desember 2022 sebesar Rp139.142,00 yang berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp135.919,00 yang terdiri dari:

Tabel 64. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Bunga Rekening Giro Rekening Hibah Non Pilkada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	F08E58N 3E1JRT99 67	20 Desember 2022	498
2	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Tulang Bawang	F08E58N 3E1JJRT9 67	30 November 2022	2.985
3	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Lampung Utara	2122733C IF22DCF 9P	20 Oktober 2022	33.069
4	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Pringsewu	4341E55 DENAA9 AIF	24 November 2022	3.014

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
5	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Tulang Bawang	F08E58N 3E1JJRT9 67	30 November 2022	55.257
6	Jasa Giro Hibah Non Pilkada Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	2122733C IF22DCF 9P	20 Oktober 2022	41.096
Jumlah				135.919

Selanjutnya, Pendapatan dari Penutupan Rekening sebesar Rp3.223,00 merupakan saldo rekening hibah pilkada tahun 2017 yang telah dilakukan penutupan atas rekening RPL 017 Panwas Kab. Lampung Utara UTK PS dengan nomor rekening 015501001965309 pada Bank Rakyat Indonesia KC Kotabumi pada tanggal 24 Maret 2023.

*Beban
Pegawai
Rp13,63
Miliar*

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.639.553.548,00 dan Rp12.315.944.470,00 dengan rincian sebagai berikut. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan *pembentukan* modal.

Tabel 65. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	1.232.216.620	655.275.115	88%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-951	-493	93%
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.338	11.639	101%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	85.143.476	54.327.574	57%
Beban Tunj. Anak PNS	25.680.166	15.238.934	69%

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		-25.000	-100%
Beban Tunj. Struktural PNS	136.760.000	128.900.000	6%
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-9.720.000		100%
Beban Tunj. Fungsional PNS	35.052.000	3.960.000	785%
Beban Tunj. PPh PNS	95.934.178	73.857.784	30%
Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS		-400	-100%
Beban Tunj. Beras PNS	79.951.680	46.638.480	71%
Beban Uang Makan PNS	326.742.000	294.301.000	11%
Beban Tunjangan Umum PNS	55.915.000	28.785.000	94%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-1.480.000	-1.260.000	17%
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	10.245.184.400	10.075.169.900	2%
Beban Uang Lembur	35.274.000	52.722.850	-33%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.296.877.641	888.042.087	46%
Jumlah	13.639.553.548	12.315.944.470	11%

Beban Pegawai per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 11% dari tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain :

- 1) Pembayarannya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pejabat Struktural Eselon II, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung.
- 2) Pembayaran Tunjangan Kinerja (THR) dan Gaji ke13 kepada PNS Organik Bawaslu Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota sebesar 50%
- 3) Pembayaran gaji pegawai CPNS Angkatan 2021 sebanyak 10 orang di Lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung.
- 4) Kenaikan pangkat dari II/d ke III/a pada 2 orang pegawai Sekretariat Provinsi Bawaslu Lampung pada bulan Oktober 2022

Terdapat perbedaan jumlah belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah beban pegawai pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 66. Mutasi Pada Beban Pegawai

Mutasi Tambah:	Rp	13.658.722.964
Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022	Rp	13.658.722.964
Mutasi Kurang:	Rp	(19.169.416)
Beban Pegawai yang Masih Harus di Bayar (Jurnal balik)	Rp	(19.169.416)
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022	Rp	13.639.553.548

Beban Pegawai yang masih harus dibayar (jurnal balik) merupakan kekurangan uang makan PNS untuk pegawai Bawaslu Provinsi dan Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Kekurangan Uang makan PNS

No	Keterangan	Nominal
1	Kekurangan uang makan bawaslu provinsi	6.745.000
2	Kekurangan uang makan bawaslu kabupaten/kota	4.975.000
Jumlah		11.720.000

Selanjutnya, kekurangan Gaji PNS untuk Pegawai PNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebesar Rp7.449.416,00 dengan No. SP2D 220171301000390.

*Beban
Persediaan
Rp28,99 Juta*

D3. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.995.450,00 dan Rp24.640.400,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik Turun (%)
Beban Persediaan Konsumsi	28.995.450	40.540.750	28%
Jumlah Beban Persediaan	28.995.450	40.540.750	28%

Beban persediaan per 31 Desember 2022 merupakan beban yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut:

Tabel 69. Mutasi Persediaan

Belanja Barang Persediaan (LRA)	26.334.400
Saldo Awal Barang Konsumsi	3.061.050
Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	320.000
Jumlah Mutasi Tambah	29.715.450
Barang Konsumsi 31 Desember 2022	720.000
Jumlah Mutasi Kurang	720.000
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022	28.995.450

Berikut rincian penjelasan Mutasi Tambah Persediaan pada Bawaslu Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2021. Belanja barang persediaan Barang Konsumsi adalah persediaan dalam bentuk keperluan rutin untuk kegiatan dikantor seperti ATK, HVS, Amplop, Tinta Printer, dll. Belanja barang persediaan barang konsumsi penanganan pandemi covid adalah persediaan dalam bentuk *Handsanitizer*. Dan Utang yang belum ditagihkan adalah belanja persediaan yang belum ditagihkan per 31 Desember 2022.

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp27.688.571.639,00 dan Rp21.821.600.258,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp 27,68
Miliar*

aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 70. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-	-292.600	-100%
Beban Keperluan Perkantoran	16.068.678.032	15.064.170.108	7%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.155.999	5.478.500	-24%
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	-25.000	-100%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	679.932.000	811.391.500	-16%
Beban Barang Operasional Lainnya	300.308.000	108.796.968	176%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	95.414.433	391.792.060	-76%
Beban Bahan	2.587.967.920	1.696.790.621	53%
Beban Honor Output Kegiatan	1.416.550.000	796.850.000	78%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	347.230.000	114.973.500	202%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	-	7.775.000	-100%
Beban Langganan Listrik	377.699.081	365.390.857	3%
Beban Langganan Telepon	61.568.661	53.266.898	16%
Beban Langganan Air	21.740.860	10.778.180	102%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16.529.555	-	100%
Beban Sewa	4.903.406.457	2.220.496.666	121%
Pengembalian Beban Sewa	-	-12.375.000	-100%
Beban Jasa Profesi	794.000.000	137.000.000	480%
Beban Jasa Lainnya	-	600.000	-100%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	840.000	48.742.000	-98%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	12.792.000	-	100%
Jumlah	27.841.812.998,	21.821.600.258	28%

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Provinsi Lampung, sehingga terjadi penambahan beban barang dan jasa serta diperbolehkannya kegiatan tatap muka dengan persyaratan, sehingga beban barang dan jasa terkait kegiatan tatap muka

semakin meningkat.

Beban Barang dan Jasa yang menggunakan akun penanganan Pandemi COVID-19 terdapat pada Satuan Kerja adalah :

Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 Digunakan untuk:

1. Bantuan komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet dan pembayaran akun zoom;
2. Pengadaan masker/hand sanitizer diperuntukkan bagi kegiatan tertentu (tidak memenuhi kriteria persediaan);
3. Biaya penyemprotan disinfektan di area kantor yang dilaksanakan swakelola;

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 71. Mutasi Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa	28.235.455.619
Penambahan Beban Sewa atas Sewa Dibayar Dimuka Tahun Anggaran Yang Lalu	519.116.668
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	12.792.000
Penambahan beban yang masih harus dibayar	2.855.474
Jumlah Mutasi Tambah	28.770.219.761
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	1.063.066.801
Jurnal Balik Atas Beban Tahun Yang Lalu	18.581.321
Jumlah Mutasi Kurang	1.081.648.122
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022	27.688.571.639

Berikut rincian penjelasan Mutasi Tambah Beban Barang dan Jasa pada Bawaslu Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2022.

1. Penambahan beban sewa atas Sewa Dibayar Dimuka Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp519.116.668,00 adalah sewa atas pembayaran gedung kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten.
2. Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin senilai Rp12.792.000,00

yang merupakan kursi besi/metal sebanyak 16 unit.

3. Penambahan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp2.855.474,00 adalah beban atas tunggakan pada Bawaslu Kabupaten per tanggal 31 Desember 2022. Rincian beban yang masih harus dibayar tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 72. Rinciaan Beban Yang Masih Harus Dibayar

No	Penerima	Untuk Pembayaran	Jumlah
1	Lampung Selatan	Air PAM	740.300
2	Lampung Selatan	Telpon	429.850
3	Tulang Bawang	Internet	535.800
4	Tulang Bawang	Listrik	649.524
5	Tulang Bawang	Telpon	500,000
Jumlah			2.855.474

4. Belanja dibayar dimuka yang merupakan sewa untuk gedung kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sewa kendaraan untuk Kabupaten/Kota. Rincian belanja dibayar dimuka sebagai berikut:

- a. Kota Metro untuk sewa gedung senilai Rp15.000.000,00
- b. Kabupaten Lampung Tengah untuk sewa gedung senilai Rp17.500.000,00
- c. Kabupaten Lampung Utara untuk sewa gedung senilai Rp46.666.667,00
- d. Kabupaten Lampung Barat untuk sewa gedung senilai Rp35.000.000,00
- e. Kabupaten Tulang Bawang untuk sewa gedung senilai Rp29.166.667,00
- f. Kabupaten Tanggamus untuk sewa gedung senilai Rp46.666.667,00
- g. Kabupaten Lampung Timur untuk sewa gedung senilai Rp39.666.667,00
- h. Kabupaten Way Kanan untuk sewa gedung senilai Rp46.566.667,00
- i. Kabupaten Pesawaran untuk sewa gedung senilai Rp34.000.000,00
- j. Kabupaten Pringsewu untuk sewa gedung senilai Rp23.333.333,00

- k. Kabupaten Mesuji untuk sewa gedung senilai Rp17.500.000,00
 - l. Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk sewa gedung senilai Rp29.166.667,00
 - m. Kabupaten Pesisir Barat untuk sewa gedung senilai Rp5.833.333,00
 - n. Provinsi Lampung untuk sewa gedung senilai Rp349.000.000,00
 - o. Provinsi Lampung untuk sewa gedung senilai Rp19.250.000,00
 - p. Kabupaten Pringsewu untuk sewa kendaraan dari dana hibah senilai Rp27.777.778,00
 - q. Kabupaten Lampung Utara untuk sewa kendaraan dari dana hibah senilai Rp51.060.000,00
 - r. Kota Metro untuk sewa kendaraan dari dana hibah senilai Rp76.490.100,00
 - s. Kabupaten Tulang Bawang untuk sewa kendaraan dari dana hibah senilai Rp52.597.350,00
 - t. Kabupaten Lampung Timur untuk sewa kendaraan dari dana hibah senilai Rp25.624.905,00
 - u. Kabupaten Lampung Selatan untuk sewa kendaraan dari dana hibah senilai Rp75.200.000,00
5. Jurnal balik atas beban Tahun Yang Lalu sebesar Rp18.581.321,00 adalah pembayaran kepada pihak ketiga seperti pembayaran listrik, air, internet dan telepon baik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten. Rincian pembayaran kepada pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 73. Rincian Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Tahun Yang Lalu

No	Penerima	Untuk Pembayaran	Jumlah
1	Lampung Selatan	Air PAM	66.200
2	Lampung Selatan	Telpon	500.000
3	Tulang Bawang	Internet	555.000
4	Tulang Bawang	Listrik	725.473
5	Tulang Bawang	Telpon	500.000
6	Provinsi Lampung	Telpon	202.150
7	Provinsi Lampung	Internet	4.589.500
8	Provinsi Lampung	Listrik	3.930.889
9	Provinsi Lampung	Listrik	3.912.109
10	Provinsi Lampung	Jasa Profesi	3.600.000
Jumlah			18.581.321

*Beban
Pemeliharaan
Rp1,27
Miliar*

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.271.905.473,00 dan Rp590.743.121,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	296.597.480	12.910.000	2197%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	975.307.993	577.833.121	69%
Jumlah	1.271.905.473	590.743.121	115%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa beban pemeliharaan per 31 Desember

2022 mengalami kenaikan dibandingkan per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain :

- Pada tahun 2022 BBM rutin kendaraan operasional Bawaslu Provinsi dianggarkan maksimal 100% dari standar biaya masukan, sedangkan tahun 2021 dianggarkan maksimal 50% dari standar biaya masukan.
- Pada tahun 2022 terdapat biaya pemeliharaan Gedung atas sewa Gedung kantor Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi lampung.

Tidak terdapat perbedaan jumlah belanja pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah beban pemeliharaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022.

Tabel 75. Mutasi Pada Beban Pemeliharaan

Mutasi Tambah :	Rp	1.271.905.473
Belanja Pemeliharaan	Rp	1.271.905.473
Mutasi Kurang :	Rp	-
Jumlah Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022	Rp	1.271.905.473

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp16,91
Miliar*

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.915.907.037,00 dan Rp7.029.430.798,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 76. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	6.699.259.216	5.553.104.745	21%
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-8.264.538	-	100%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	961.867.500	204.370.000	371%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.934.555.000	1.271.956.053	524%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.328.489.859	-	100%
Jumlah	16.915.907.037	7.029.430.798	141%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa beban perjalanan dinas mengalami kenaikan dibandingkan per 31 Desember 2021. Hal ini dikarenakan sudah diperbolehkannya kegiatan tatap muka sehingga harus memenuhi undangan kegiatan dari dalam kota hingga luar kota.

Terdapat perbedaan jumlah belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022.

Tabel 77. Mutasi Pada Beban Perjalanan Dinas

Mutasi Tambah :	Rp	16.925.811.575
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	16.925.811.575
Mutasi Kurang :	Rp	9.904.538
Pengembalian Belanja	Rp	8.264.538
Jurnal Balik Atas Beban Tahun Yang Lalu	Rp	1.640.000
Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022	Rp	16.915.907.037

Berikut rincian penjelasan Mutasi Beban Perjalanan Dinas pada Bawaslu Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2022. Mutasi kurang jurnal balik atas beban tahun yang lalu sebesar Rp1.640.000,00 adalah beban perjalanan dinas biasa atas undangan dari Bawaslu Republik Indonesia tahun 2021 yang sudah dibayarkan pada tahun 2022. Sedangkan rincian pengembalian belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 78. Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Pengembalian Belanja				
No	Keterangan	NTPN	Tgl Setor	Jumlah
1	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Rosa Septiawan	DC59945IPS DJKK2O	15 Desember 2022	950.000
2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Hermansyah, Tyas Woroasih dan Dirga Santosa	4ECCB5209 N001M8F	15 Desember 2022	600.000
3	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Fatikhatul Khoiriyah	689877N8P6 N58NI4	15 Desember 2022	997.998
4	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Harian dan Hotel a.n Fatikhatul Khoiriyah	DB53D5209 N001N99	15 Desember 2022	1.553.660
5	Pengembalian Kelebihan	8BA7C0JSQI	15 Desember	300.000

	Pembayaran BBM a.n Widodo Wuryanto	420IV0	2022	
6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Transport a.n Widodo Wuryanto	E8ED96QR9 C4OROAF	15 Desember 2022	200.000
7	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBM/Transport a.n Widodo Wuryanto	68D7D5UD9 HICEM44	15 Desember 2022	204.980
8	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Iskardo P Panggar	CFEB5395A 1R77O43	15 Desember 2022	1.185.800
9	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penginapan di Lampung Utara a.n Hermansyah, Erwin, Eviyatun, Dirga	52D200JSQI 420NPM	15 Desember 2022	200.000
10	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBM/Transport a.n Widodo Wuryanto	32EF15209N 001JB1	15 Desember 2022	204.980
11	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel Way Kanan a.n Tamri Suhaimi	73F755UDP HICERV0	15 Desember 2022	400.000
12	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel Way Kanan a.n Haris, Theresia dan Yanuar	F67A07N8P6 N58O1O	15 Desember 2022	720.000
13	Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas	1637F45IPS DIO6L6	15 Desember 2022	552.100
Jumlah				8.264.538

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.347.999.455,00 dan Rp1.135.832.019,00.

Tabel 79. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Desember 2022 dan 2021

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Des 2022 (Rp)	30 Des 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.104.219.138	1.039.048.358	6%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.633.840	2.316.920	100%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	533.333	533.333	0%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	22.815.644	14.383.408	59%
Jumlah Penyusutan	1.132.201.955	1.056.282.019	7%
Beban Amortisasi Software	215.797.500	79.550.000	171%
Beban Amortisasi Lain-Lain	-	-	0%
Jumlah Amortisasi	215.797.500	79.550.000	171%

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp1,34
Milyar

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.347.999.455	1.135.832.019	19%
---	----------------------	----------------------	------------

Terdapat perbedaan antara beban penyusutan dan amortisasi pada laporan operasional dan neraca sebesar Rp12.792.000,00 yang merupakan kursi besi/metal sebanyak 16 unit.

*Surplus /
Defisit dari
Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya*

D. 8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp41,00 dan Rp0,00. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 80. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,00	-	100%
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,00	-	100%
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,00	-	100%

*Pos Luar
Biasa Rp0,00*

D. 9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Defisit LO
Rp60,89
Miliar*

D. 10 Surplus/Defisit LO

Defisit LO per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp60.892.793.419,00 dan Rp42.934.091.416,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp5,85
Miliar*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.858.745.218,00 dan Rp23.900.235.785,00.

*Defisit LO
Rp60,89
Miliar*

E. 2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar Rp60.892.793.419,00 dan Rp42.934.091.416,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp 61,50
Miliar*

E. 3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp61.503.104.919,00 dan Rp32.647.179.049,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 81. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2022	2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	59.954.033.403	32.450.147.459
Diterima dari Entitas Lain	-135.960	-66.223.410
Transfer Keluar	-69.012.070	0
Pengesahan Hibah Langsung	1.181.023.956	275.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-11.904.410	-11.745.000
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	449.100.000	0
Jumlah	61.503.104.919	32.647.179.049

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN), sedangkan DKEL sebesar Rp59.954.033.403,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni. terdiri dari:

Tabel 82. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	13.658.722.964,00
Belanja Barang	46.451.562.529,00
Belanja Modal	877.168.500,00
Pengesahan Hibah Langsung	-1.181.023.956,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	11.904.410,00
Hibah Langsung Bentuk Barang	135.698.956,00
Jumlah	59.954.033.403

2. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp135.960,00 merupakan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu tahun 2021.

Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp135.919,00 adalah sebagai berikut.

**Tabel 83. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
(Jasa Giro)**

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Bunga Rekening Giro Rekening Hibah Non Pilkada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	F08E58N 3E1JRT99 67	20 Desember 2022	498
2	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Tulang Bawang	F08E58N 3E1JJRT9 67	30 November 2022	2.985
3	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Lampung Utara	2122733C IF22DCF 9P	20 Oktober 2022	33.069
4	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Pringsewu	4341E55 DENAA9 AIF	24 November 2022	3.014
5	Jasa Giro Rekening Hibah Non Pilkada Sekretariat Bawaslu Kab Tulang Bawang	F08E58N 3E1JJRT9 67	30 November 2022	55.257
6	Jasa Giro Hibah Non Pilkada Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	2122733C IF22DCF 9P	20 Oktober 2022	41.096
Jumlah				135.919

Selanjutnya Rp41,00 merupakan PNBPN yang diperoleh dari Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dari Belanja Pembulatan Gaji PNS atas Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji PNS Bulan Desember tahun 2021 dengan nomor SPM 00011 dan nomor SP2D 220171301000390.

3. Transfer Keluar

Transfer Keluar sebesar Rp69.012.070,00 merupakan transfer aset ke Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Rincian Transfer Keluar

Uraian	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Transportable Generating Set	19.800.000	7.071.430	12.728.570
Lemari Besi/Metal	2.500.000	750.000	1.750.000
Alat Penghancur Kertas	2.950.000	295.000	2.655.000
Mesin Absensi	3.000.000	1.800.000	1.200.000
LCD Projector/Infocus	4.985.000	498.500	4.486.500
Meja Kerja Kayu	1.320.000	1.056.000	264.000
Meja Kerja Kayu	1.320.000	1.056.000	264.000
Meja Kerja Kayu	1.320.000	1.056.000	264.000
Kursi Besi/Metal	1.100.000	880.000	220.000
A.C. Split	4.650.000	3.720.000	930.000
A.C. Split	4.650.000	3.720.000	930.000
A.C. Split	4.650.000	3.720.000	930.000
A.C. Split	4.650.000	3.720.000	930.000
Sound System	6.160.000	3.080.000	3.080.000
Handy Cam	4.700.000	3.760.000	940.000
Alat Kedokteran Lainnya	1.980.000	990.000	990.000
P.C Unit	10.000.000	1.250.000	8.750.000
P.C Unit	7.299.150	7.299.150	-
P.C Unit	7.299.150	7.299.150	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.500.000	312.500	2.187.500
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.474.250	1.474.250	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.474.250	1.474.250	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.900.000	712.500	1.187.500
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	24.500.000	15.312.500	9.187.500
Software Komputer	6.380.000	2.392.500	3.987.500
Software Komputer	22.400.000	11.250.000	11.150.000
Jumlah	154.961.800	85.949.730	69.012.070

Saldo transfer keluar sebesar Rp69.012.070,00 merupakan nilai buku aset. Nilai buku aset tersebut adalah pengurangan nilai aset sebesar Rp154.961.800,00 dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan sebesar Rp85.949.730,00 merupakan saldo per-semester 1 karena saldo

akumulasi penyusutan pada semester 2 berada pada Bawaslu Kota Bandar Lampung. Transfer keluar dilakukan pada tanggal 05 September 2022.

4. Hibah

Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp1.181.023.956,00 merupakan pengesahan pada hibah bentuk uang dan hibah barang pada tahun 2022.

Berikut rincian hibah bentuk uang:

Tabel 85. Rincian Pengesahan Hibah Langsung

No	Penerima Hibah (Bawaslu Kabupaten/Kota)	Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2022	Pengembalian Tahun 2022
1	Kabupaten Lampung Barat	100.000.000	0
2	Kabupaten Lampung Selatan	192.150.000	7.850.000
3	Kabupaten Lampung Timur	249.751.240	248.760
4	Kota Metro	170.305.200	19.800
5	Kabupaten Tulang Bawang	149.877.150	122.850
6	Kabupaten Pringsewu	50.000.000	0
7	Kabupaten Lampung Utara	121.337.000	3.663.000
Jumlah		1.033.420.590	11.904.410

Berikut rincian hibah bentuk barang:

1. Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan hibah kendaraan berupa kendaraan bermotor roda dua lainnya senilai Rp135.698.956,00
2. Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan hibah kendaraan berupa kendaraan mini bus (penumpang 14 orang kebawah) Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp449.100.000,00

E. 4 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp514.075.787 dan Penurunan Ekuitas pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 18.041.490.567,00.

*Kenaikan
Ekuitas
Rp514,07
Juta*

Tabel 86. Perbandingan Kenaikan dan Penurunan Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2022	2021
Surplus/Defisit LO	-60.892.793.419	-42.934.091.416
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-96.235.713	0
Lain-lain	0	-7.754.578.200
Transaksi Antar Entitas	61.503.104.919	32.647.179.049
Jumlah	514.075.787	-18.041.490.567

Koreksi nilai aset non revaluasi merupakan koreksi nilai aset tetap non revaluasi yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada hibah kendaraan mini bus (penumpang 14 orang kebawah) atas Tahun Anggaran Yang Lalu dari Kabupaten Lampung Tengah. Rincian koreksi nilai aset tetap non revaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 87. Rincian Koreksi Nilai Asset Tetap Non Revaluasi

Deskripsi Transaksi	Saldo
Hibah Masuk Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-34,285,713
Hibah Masuk Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-30,107,142
Hibah Masuk Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-31,842,858
Jumlah	-96,235,713

Ekuitas Akhir **E. 5 Ekuitas Akhir**
Rp 6,37
Miliar

Nilai ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp6.372.821.005,00 dan Rp5.858.745.218,00.

Nilai ekuitas akhir sebesar Rp6.372.821.005,00 merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp5.858.745.218,00 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp514.075.787,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama.

Berikut Struktur Organisasi di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan:

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas 5 (Lima) Unit Eselon I yang anggarannya masih dalam 1 (satu) DIPA, yaitu:
 - a. Inspektorat Utama;
 - b. Deputi Bidang Administrasi;
 - c. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 - d. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
 - e. Pusat Data dan Informasi.
2. Sekretariat Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang Sekretariat Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi dengan 2 (dua) Kriteria, yaitu:

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:

 - a. Bagian Administrasi;
 - b. Bagian Pengawasan Pemilu;

c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan

d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas:

a. Bagian Administrasi;

b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan

c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi;

b. Subbagian Pengawasan Pemilu;

c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan

d. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi;

b. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan

c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan Hukum.

Sehubungan dengan terbitnya SOTK dimaksud, pengangkatan Jabatan Struktural Kepala Sekretariat di beberapa Sekretariat Bawaslu Provinsi telah dilaksanakan mulai Bulan Desember 2019, sedangkan pengisian jabatan fungsional lainnya mulai dilakukan di Tahun 2020.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang melaksanakan pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan sebagai Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1210/PR.03.01/SJ/04/2022 hal Usulan Penambahan Satker Bawaslu

Kab/Kota sebanyak 31 satker baru. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung akan membawahi 2 UKM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan status masih 1 (satu) DIPA dengan satker, yaitu Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-211/AG/AG.5/2022 Tanggal 02 Juni 2022 Hal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1484/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tanggal 27 November 2020, telah dilantik sejumlah Pejabat Fungsional Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas :

- a. Analis Kebijakan Muda
- b. Analis Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
- c. Analis Hukum Ahli Pertama
- d. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda;

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1416/KP.04.00/SJ/04/2021 Tanggal 01 April 2021, telah dilantik Pejabat Administrator Sekretariat Bawaslu Provinsi yakni Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung a/n Firdinan Islami, S.STP., M.Si.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2021 terdapat perubahan SOTK baru dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 88. Daftar Pejabat Di Lingkungan
Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung**

No	Uraian	Nama	Eselon
1	Kepala Sekretariat	Widodo Wuryanto, S.Ip, M.Si	II
2	Kepala Bagian Administrasi	Mimi Abriyani,S.E, M.E	III
3	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Indra Darmawan, S.I.P., M.M.	III
4	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Erwin Prima Rinaldo, S.I.P., M.H.	III
5	Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Indra Darmawan, S.I.P., M.M.	III
6	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantauan (Analisis Kebijakan Muda)	Puput Putri Sari, S.Si	
7	Kepala Sub Bagian SDM dan Umum (Analisis Pengadaan Barang dan Jasa)	Theresia Agustina P, S.Psi., M.M	
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara	Aldila Yugha Andranik	
9	Jabatan Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fanji Ampira Mahesa Putra, A.Md	
10	Analisis Hukum Ahli Pertama	Amelia, S.H	
11	Analisis Hukum Ahli Pertama	Eviyatun Ruaida, S.H.	

F.2. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari:

- a. Rekening Rupiah Murni Satker Bawaslu Provinsi Lampung sejumlah 16 rekening;

Tabel 89. Rekening Rupiah Murni

No	No VA	Nama Rekening
1	652296862641000	BPG 017 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
2	652296862641012	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
3	652296862641006	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
4	652296862641005	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
5	652496862641007	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
6	652296862641001	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG
7	652296862641008	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN TANGGAMUS
8	652296862641003	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
9	652296862641002	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN WAY KANAN
10	652296862641014	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN PESAWARAN
11	652296862641004	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN PRINGSEWU
12	652296862641013	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN MESUJI
13	652496862641015	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
14	652296862641011	BPP 017 PANWASLU KABUPATEN PESISIR BARAT
15	652296862641010	BPP 017 PANWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG
16	652296862641009	BPP 017 PANWASLU KOTA METRO

F.3. Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 003/KU.01.00/LA/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Tabel 90. Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022

No	Jabatan	Nama
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Widodo Wuryanto, S.Ip, M.Si
2	Pejabat Pembuat Komitmen	Mimi Abriyani, S.E.,M.E
3	Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	Puput Putri Sari, S.Si
4	Bendahara Pengeluaran	Aldila Yuga Andranik, S.E

Tabel 91. PPK Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

No	Provinsi/Kabupaten	Nama
1	Kota Bandar Lampung	Firdinan Islami, S.STP., M.Si
2	Kota Metro	Marzuki, S.E
3	Kabupaten Pesawaran	Theresia Agustina PA, S.Psi., M.M
4	Kabupaten Lampung Tengah	Lukito Hadi Sumarto, S.A.P
5	Kabupaten Way Kanan	Azroni, S.E
6	Kabupaten Pringsewu	Muhammad Samsir, S.Pd.I
7	Kabupaten Lampung Selatan	Febriyanti Putri, S.E., M.M
8	Kabupaten Lampung Barat	Yulianto Nuzuli, S.I.P
9	Kabupaten Lampung Utara	Dwi Hendro Nugroho. S.E. • M M
10	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Darsani, S.E
11	Kabupaten Pesisir Barat	Ahmad Tambat, S.Pd., M.M
12	Kabupaten Tulang Bawang	Fardhoriyansah SY. S.H ,M H
13	Kabupaten Tanggamus	Adi Martha Ismail, S.Sos
14	Kabupaten Mesuji	Rudi Juliansyah S.Pd
15	Kabupaten Lampung Timur	Khoirul Anam, S.STP

Tabel 92. BPP Bawaslu Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2022

No	Jabatan	Nama/NIP
1.	Staf PNS Bawaslu Provinsi Lampung	Fanji Ampra Mahesa Putra, A.Md NIP. 19910526 201503 1 001
2.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kota Metro	Choirul Mu'amiroh, S.IP NIP. 19850628 200501 2 002
3.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Nur'aini, A.Md NIP. 19670718 200701 2 017
4.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Aria Alfariza, S. IP NIP. 19790603 200701 1 011
5.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Muhtadin, S.IP NIP. 19760403 200701 1 003
6.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Deni Afero, S.Sos NIP. 19890816 201503 1 001

No	Jabatan	Nama/NIP
7.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Panji Asmara, S.Pd.I NIP. 19880102 201101 1 004
8.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Sri Yusmi, S.H NIP. 19730905 201410 2 002
9.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Noviana Eka Indrawati, S.E NIP. 19791119 200701 2 002
10.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Eva Raila, A.Md NIP. 19850214 201403 2 002
11.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Danil NIP. 19850410 201001 1 007
12.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Alvindra.S.IP., M.IP NIP. 19900821 201502 1 002
13.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Mesuji	Zulkifli NIP. 19781108 200701 1 003
14.	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Aan Setiawan NIP. 19870427 200604 1 004
15.	Staf PNS Bawaslu Provinsi Lampung	Hendi Pratama, A.Md NIP. 19911218 201902 1 001

F.4. Dampak Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19

1. Secara umum Badan Pengawas Pemilu mengalami dampak langsung dari sisi anggaran dimana anggaran Tunjangan Kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 (di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota), belanja operasional perkantoran maupun kegiatan-kegiatan berkurang.
2. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi menteri Keuangan tersebut Bawaslu melakukan langkah-langkah percepatan revisi anggaran dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya Refocusing Anggaran Kegiatan (dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19 di masing-masing Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota) dengan pencadangan anggaran.

F.5. Rekapitulasi Dana Hibah dan Pencairan Bawaslu per 31 Desember 2022

Tabel 93. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Barat

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kabupaten Lampung Barat
Nomor Register	2ZVL53YA

Pendonor	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor NPHD	900/III/KONTRAK/IV.03/2022
Tanggal NPHD	28 Maret 2022
Nilai NPHD	100.000.000
Saldo Awal Tahun 2022	0
Total Jumlah Uang Yang Diterima Tahun 2022	100.000.000
SPHL Tahun 2022	100.000.000
Penyesuaian Beban (LO) Tahun 2022	0
Jumlah Realisasi Tahun 2022	100.000.000
SP3HL Tahun 2022	0
Saldo	0

Tabel 94. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Timur

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kabupaten Lampung Timur
Nomor Register	2EVB9A3A
Pendonor	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor NPHD	900/03/NPHD/23-SK/2022 dan 032/HK.02.00/LA/04/2022
Tanggal NPHD	14 April 2022
Nilai NPHD	250.000.000
Saldo Awal Tahun 2022	0
Total Jumlah Uang Yang Diterima Tahun 2022	250.000.000
SPHL Tahun 2022	249.751.240
Penyesuaian Beban (LO) Tahun 2022	0
Jumlah Realisasi Tahun 2022	249.751.240
SP3HL Tahun 2022	248.760
Saldo	0

Tabel 95. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kabupaten Lampung Selatan
Nomor Register	2G3A766A
Pendonor	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor NPHD	900/015/V.6/2022
Tanggal NPHD	09 Mei 2022
Nilai NPHD	200.000.000
Saldo Awal Tahun 2022	0
Total Jumlah Uang Yang Diterima Tahun 2022	200.000.000
SPHL Tahun 2022	192.150.000
Penyesuaian Beban (LO) Tahun 2022	0
Jumlah Realisasi Tahun 2022	192.150.000
SP3HL Tahun 2022	7.850.000
Saldo	0

Tabel 96. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Utara

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kabupaten Lampung Utara
Nomor Register	2VRFUDA
Pendonor	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
Nomor NPHD	800/50/40-LU/VI/2022 dan 100/KU.00.01/LA-05/2022
Tanggal NPHD	7 Juni 2022
Nilai NPHD	125.000.000
Saldo Awal Tahun 2022	0
Total Jumlah Uang Yang Diterima Tahun 2022	125.000.000
SPHL Tahun 2022	121.337.000
Penyesuaian Beban (LO) Tahun 2022	0
Jumlah Realisasi Tahun 2022	121.337.000
SP3HL Tahun 2022	3.663.000
Saldo	0

Tabel 97. Hibah Bawaslu Kabupaten Pringsewu

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kabupaten Pringsewu
Nomor Register	2AEAGETA
Pendonor	Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Nomor NPHD	31/NPHD/B.06/2022 dan 078/HK.01.01/LA/06/2022
Tanggal NPHD	07 Juni 2022
Nilai NPHD	50.000.000
Saldo Awal Tahun 2022	0
Total Jumlah Uang Yang Diterima Tahun 2022	50.000.000
SPHL Tahun 2022	50.000.000
Penyesuaian Beban (LO) Tahun 2022	0
Jumlah Realisasi Tahun 2022	50.000.000
SP3HL Tahun 2022	0
Saldo	0

Tabel 98. Hibah Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kabupaten Tulang Bawang
Nomor Register	2QTLKCA
Pendonor	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor NPHD	900/0527/V.2/TB/VI/2022 dan 079/HK.01.01/LA/06/2022
Tanggal NPHD	16 Juni 2022
Nilai NPHD	150.000.000
Saldo Awal Tahun 2022	0
Total Jumlah Uang Yang Diterima Tahun 2022	150.000.000
SPHL Tahun 2022	149.877.150
Penyesuaian Beban (LO) Tahun 2022	0
Jumlah Realisasi Tahun 2022	149.877.150
SP3HL Tahun 2022	122.850
Saldo	0

Tabel 99. Hibah Bawaslu Kota Metro

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kota Metro
Nomor Register	2J6EXLHA
Pendonor	Pemerintah Daerah Kota Metro
Nomor NPHD	163/NPHD/SETDA01/2022 dan 088/HK.01.01/LA/06/2022
Tanggal NPHD	27 Juni 2022
Nilai NPHD	170.325.000
Saldo Awal Tahun 2022	0
Total Jumlah Uang Yang Diterima Tahun 2022	170.325.000
SPHL Tahun 2022	170.305.200
Penyesuaian Beban (LO) Tahun 2022	0
Jumlah Realisasi Tahun 2022	170.305.200
SP3HL Tahun 2022	19.800
Saldo	0

F.6. Rekapitulasi Dana Hibah Barang/Jasa per 31 Desember 2022**Tabel 100. Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah**

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kabupaten Lampung Tengah
Nomor Register	2FYN7FJA
Pendonor	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
No. NPHD	024/354/BA/Setda.III. 08/2020
Tgl. NPHD	7 September 2020
Nilai NPHD	449.100.000
Total Jumlah Barang/Jasa Yang Diterima Tahun 2022	449.100.000
MPLH-BJS Tahun 2022	449.100.000

Tabel 101. Hibah Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor Register	2SXNMVCA
Pendonor	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
No. NPHD	900/133/III.06/NPHD/TUBABA/2022
Tgl. NPHD	5 Oktober 2022
Nilai NPHD	135.698.956
Total Jumlah Barang/Jasa Yang Diterima Tahun 2022	135.698.956
MPLH-BJS Tahun 2022	135.698.956

F.7. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK, BPKP dan INSPEKTORAT UTAMA

Terdapat Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022 berupa :

1. Terdapat dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tanggal 11 September 2017.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah ditindak lanjut dengan menyerahkan Berita Acara Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP pada Bawaslu Provinsi Lampung.

2. Terdapat pembayaran sesuai kuitansi lebih besar dari Nota pada Belanja Bahan (pembelian ATK, Spanduk, Fotocopy) senilai Rp639.900,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tanggal 11 September 2017, Bab I

poin E.c yang menyebutkan prinsip penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan meliputi Akuntabel yaitu penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah ditindak lanjut dengan menyerahkan Berita Acara Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP pada Bawaslu Provinsi Lampung.

3. Masih terdapat pajak yang belum disetor sebesar Rp176.381.930,00. Berdasarkan buku pembantu pajak selama Tahun 2019 terdapat pemungutan pajak sebesar Rp217.638.492,00 dan telah disetor sebesar Rp41.256.562,00 sehingga masih terdapat pajak yang belum disetor sebesar Rp176.381.930,00.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah dilakukan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp64.449.900,00 dengan :

- NTPN 63C302LTRLFPEDN4 pada tanggal 2 Desember 2019.
- NTPN CAE1431BBHJ2499B Rp468.500,00 tanggal 10 Desember 2019.
- NTPN 789431PGBASDB31S6 Rp13.339.545,00 tanggal 10 Desember 2019.
- NTPN 2123A67JR19B06JT RP34.296.628,00 tanggal 10 Desember 2019

Telah dilakukan tindak lanjut tanggal 29 Oktober 2021 dengan penyetoran :

- NTPN DD96F00LI9IR6BI8 tanggal 24 Februari 2020 Rp40.000.000,00.
- NTPN 87D0C741JIB1MC6O tanggal 2 Maret 2020 Rp20.098.987,00.

- NTPN 8852B1PGBV61AS4M tanggal 28 Agustus 2019 Rp1.285.636,00.
 - NTPN F0B6380EQP6N5UKF tanggal 30 Desember 2019 Rp1.818.181,00.
 - NTPN 635DC67JR41SRAVP tanggal 30 Desember 2019 Rp1.214.545,00.
4. Terdapat dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang tidak ada tanda tangan dan stempel tempat tujuan yaitu ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, pada SPJ Kecamatan Sendang Agung, Seputih Surabaya, Seputih Agung, Anak Ratu Aji, Trimurjo, Terusan Nunyai, Punggur, Bekri. - Kwitansi pembelian tidak bertanggal. - Nota pembelian tidak bertanggal dan tidak ada nama penjual. - Nota belanja penggandaan/foto copy pada Panwascam Seputih Agung untuk bulan Januari dan Februari 2019 berupa nota kosong.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah dilakukan tindak lanjut berupa melengkapi dokumentasi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.

5. Pembayaran tenaga pelaksana di Kec. yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pembayaran honor pelaksana PNS Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah (ada 28 Kecamatan) selama Januari sampai dengan Mei 2019 (5 bulan) dibayarkan dengan nominal Rp1.000.000,00/orang per bulan (1 kecamatan ada 1 orang pelaksana PNS) sehingga jumlah pengeluaran sebesar Rp140.000.000,00 (Rp1.000.000,00 x 28 orang x 5 bulan).

Hasil Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan bersama BPKP saat acara di Bali bahwa temuan Nasional ini akan diturunkan. Atas hal tersebut, kami akan bersurat kepada BPKP Perwakilan Lampung.

6. Pembayaran tagihan listrik tidak sesuai antara kuitansi dan nota bulan Januari s.d April pada Kantor Panwascam Kecamatan Trimurjo dan Punggur. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tanggal 11 September 2017.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN 72C273CIE6AA5PKV Rp3.068.770,00 tanggal 27 Desember 2019.

7. Terdapat kegiatan bimtek saksi parpol dengan peserta PKB diana bukti SPJnya tidak runut. Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019, undangan ke DPAC PKB tanggal 10 April 2019, jawaban dari PKB tanggal 9 April 2019 yang menyatakan tidak dapat menghadiri pelatihan saksi parpol tersebut. Kegiatan tetap dilaksanakan dengan SPJ sebesar Rp5.525.000,00.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah dilakukan tindak lanjut untuk melakukan verifikasi kebenaran SPJ oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pembayaran honor Panitia, Moderator dan Narasumber pada kegiatan Bimtek Kearsipan Bawaslu Kota Bandar Lampung, tidak dilengkapi dengan SK Panitia, Moderator dan Narasumber Bimtek tersebut dengan pengeluaran sebesar Rp1.400.000,00
Pembayaran Honor Panitia, Moderator dan Narasumber pada kegiatan Bimtek Saksi Parpol sebesar tidak dilengkapi dengan SK Panitia, Moderator dan Narasumber.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada BPKP terkait TL dengan nomor: 072/LA- 14/KU.00.01/XII/2019 Perihal TL atas

Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kota Bandar Lampung bertanggal 20 Desember 2019.

9. Terdapat Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa yang belum dipungut yaitu: - Sewa AC untuk kantor Gakkumdu sebesar Rp4.250.000,00; - Sewa meubelair sebesar Rp10.000.000,00 untuk Kantor Gakumdu Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Hasil Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti pada tanggal 10 November 2021 di Yogyakarta dengan hasil:

1. Penyetoran NTPN 6CE293HK6ALMVTO2 tanggal 20/03/2019 sebesar Rp80.000,00.
 2. Penyetoran NTPN 31A013HLCO0P31O2 tanggal 20/03/2019 sebesar Rp200.000,00.
10. Pada bukti pertanggungjawaban kegiatan Pelantikan dan Pembekalan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Panwascam Teluk Betung Utara, terdapat Surat Perjanjian Sewa Ruang Meeting untuk kegiatan tersebut di Aula SMPN 16 Bandar Lampung sebesar Rp2.500.000,00 yang tidak terdapat ketentuan yang mendasari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas sewa aula tersebut.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada BPKP terkait TL dengan nomor: 072/LA- 14/KU.00.01/XII/2019 Perihal TL atas Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kota Bandar Lampung bertanggal 20 Desember 2019.

11. Terdapat bukti pertanggungjawaban pembayaran honor Panitia Bimbingan Teknis Saksi Parpol sebanyak 5 orang dengan besaran masing-masing sebesar Rp300.000,00 yang tidak

dilengkapi dengan Surat Keputusan Panitia yang diterbitkan oleh PPK.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada BPKP terkait TL dengan nomor: 072/LA- 14/KU.00.01/XII/2019 Perihal TL atas Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kota Bandar Lampung bertanggal 20 Desember 2019.

12. Kegiatan Bimtek Saksi Parpol dilaksanakan di cafe big boss sesuai foto dokumentasi pada laporan kegiatan. Terdapat ketidaksesuaian bukti SPJ pada kegiatan Bimtek Saksi Parpol untuk penyewaan ruangan kegiatan.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada BPKP terkait TL dengan nomor: 072/LA- 14/KU.00.01/XII/2019 Perihal TL atas Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kota Bandar Lampung bertanggal 20 Desember 2019.

13. Pada Daftar Nominatif pembayaran Honor Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan dan POK Bawaslu Kota Bandar Lampung tercantum tarif Rp1.000.000,00 per bulan dan sudah dibayarkan selama 6 bulan untuk 20 orang (1 orang per kecamatan).

Hasil Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan bersama BPKP saat acara di Bali bahwa temuan Nasional ini akan diturunkan. Atas hal tersebut, kami akan bersurat kepada BPKP Perwakilan Lampung.

14. Honor narasumber An Fatikhatul Khoiriyah yang bersangkutan dibayarkan selama 3 jam sebesar Rp.3.000.000,00, akan tetapi di dalam Jadwal Acara Rakornis narasumber tersebut pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 08.00 s/d 10.00 (hanya 2 jam sesuai

dengan realisasinya), sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor narasumber sebesar Rp1.000.000,00.

Hasil Tindak Lanjut

Sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan NTPN : A9E2455DDRF60MTL sebesar Rp 1.000.000 - TGL 26/12/19.

15. Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bawaslu Tahun Anggaran 2008 Tidak Sesuai Ketentuan.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

16. Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan pada Panwaslu Kabupaten/Kota Dilakukan Secara Tidak Tertib dan Tidak Sesuai Ketentuan.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

17. Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

18. Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

19. Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

20. Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

21. Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

22. Kegiatan Perjalanan Dinas Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

23. Kegiatan Perjalanan Dinas Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

24. Pembayaran honorarium dan kegiatan operasional pengawasan Pemilu pada Bawaslu dan Panwaslu tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran honorarium dan kegiatan operasional pengawasan Pemilu pada Bawaslu dan Panwaslu tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

25. Pembayaran honorarium dan kegiatan operasional pengawasan Pemilu pada Bawaslu dan Panwaslu tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

26. Penatausahaan Kas Lainnya Setara Kas pada Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Belum Tertib.

Hasil Tindak Lanjut

Kami akan melakukan crosscheck ke pejabat lama dengan melihat arsip untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

27. Penatausahaan Kas Lainnya Setara Kas pada Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Belum Tertib.

Hasil Tindak Lanjut

Telah dilakukan tindak lanjut pada tanggal 29 Oktober 2021.

- Penyetoran ke rekening dana hibah RPL 017 PDHL NOREG 2 Nomor Rekening 009801003814306. Pelunasan angsuran pengembalian Dana APBD tahun 2019. Nama penyetor Abdul Majid sebesar Rp42.875.000 tanggal 30/6/2020

- Penyetoran ke rekening dana hibah RPL 017 PDHL NOREG 2 Nomor Rekening 009801003814306. Pelunasan angsuran pengembalian Dana APBD tahun 2019. Nama penyetor Abdul Majid sebesar Rp2.500.000 tanggal 30/6/2020.
- Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp20.305.092,00 pada tgl 4/9/2020 dengan NTPN 5676500M7DOR03K8

28. Kegiatan Perjalanan Dinas pada Bawaslu Provinsi yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Tindak Lanjut

Telah dilakukan pengembalian belanja perjalanan biasa pada tanggal 15 Desember 2022. Rincian pengembalian belanja perjalanan biasa tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 102. Rincian Pengembalian Belanja

Rincian Pengembalian Belanja				
No	Keterangan	NTPN	Tgl Setor	Jumlah
1	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Rosa Septiawan	DC59945IPS DJKK2O	15 Desember 2022	950.000
2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Hermansyah, Tyas Woroasih dan Dirga Santosa	4ECCB5209 N001M8F	15 Desember 2022	600.000
3	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Fatikhatul Khoiriyah	689877N8P6 N58NI4	15 Desember 2022	997.998
4	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Harian dan Hotel a.n Fatikhatul Khoiriyah	DB53D5209 N001N99	15 Desember 2022	1.553.660
5	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBM a.n Widodo Wuryanto	8BA7C0JSQI 420IV0	15 Desember 2022	300.000
6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Transport a.n Widodo Wuryanto	E8ED96QR9 C4OROAF	15 Desember 2022	200.000
7	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBM/Transport a.n Widodo Wuryanto	68D7D5UD9 HICEM44	15 Desember 2022	204.980
8	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel a.n Iskardo P Panggar	CFEB5395A 1R77O43	15 Desember 2022	1.185.800

No	Keterangan	NTPN	Tgl Setor	Jumlah
9	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penginapan di Lampung Utara a.n Hermansyah, Erwin, Eviyatun, Dirga	52D200JSQI 420NPM	15 Desember 2022	200.000
10	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BBM/Transport a.n Widodo Wuryanto	32EF15209N 001JB1	15 Desember 2022	204.980
11	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel Way Kanan a.n Tamri Suhaimi	73F755UDP HICERV0	15 Desember 2022	400.000
12	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hotel Way Kanan a.n Haris, Theresia dan Yanuar	F67A07N8P6 N58O1O	15 Desember 2022	720.000
13	Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas	1637F45IPS DIO6L6	15 Desember 2022	552.100
Jumlah				8.264.538

F.8 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

1. Tanah;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
3. Peralatan dan Mesin.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Bawaslu Provinsi Lampung tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

F.9 Capaian Output

Berikut adalah capaian output pada Bawaslu Provinsi Lampung:

1. Capaian Output Kegiatan Tahapan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022

Tabel 103. Capaian Output Kegiatan Tahapan

Kode Output	Nama RO	Target Capaian Output		Realisasi Capaian Output		%
6661.Q DB.005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi	1	Lembaga	1	Lembaga	100%
6661.Q DB.006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	14	Lembaga	14	Lembaga	100%
6662.Q DB.002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi	1	Lembaga	1	Lembaga	100%
6661.Q DB.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	14	Lembaga	14	Lembaga	100%
6838.QI C.004	Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan	14	Lembaga	14	Lembaga	100%
6661.U AB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	15	Lembaga	15	Lembaga	100%
6662.Q DB.003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	14	Lembaga	14	Lembaga	100%
Jumlah		73		73		100%

2. Capaian Output Kegiatan Reguler Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022:

Tabel 104. Capaian Output Kegiatan Reguler

Kode Output	Nama RO	Target Capaian Output		Realisasi Capaian Output		%
5245.B AH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi	1	Layanan	1	Layanan	100%
5245.B AH.002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Layanan	1	Layanan	100%

Kode Output	Nama RO	Target Capaian Output			Realisasi Capaian Output	%
5245.B DB.001	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Lembaga	1	Lembaga	100%
5245.B KC.001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi	8	Laporan	8	Laporan	100%
5245.B KC.002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota	112	Laporan	112	Laporan	100%
5156.E BA.956	Layanan BMN	1	Layanan	1	Layanan	100%
5156.E BA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	1	Layanan	100%
5156.E BA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	1	Layanan	100%
5156.E BA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1	Layanan	100%
5156.E BA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	1	Layanan	100%
5156.E BA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	100%
5156.E BB.951	Layanan Sarana Internal	116	Dokumen	116	Dokumen	100%
5156.E BC.954	Layanan Manajemen SDM	16	Dokumen	16	Dokumen	100%
5156.E BD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16	Dokumen	16	Dokumen	100%
5156.E BD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	21	Dokumen	21	Dokumen	100%
5156.E BD.955	Layanan Manajemen Keuangan	182	Dokumen	182	Dokumen	100%
5156.E BD.961	Layanan Reformasi Kinerja	60	Dokumen	60	Dokumen	100%
5156.E BD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	15	Dokumen	15	Dokumen	100%
Jumlah		555		555		100%

LAMPIRAN



Jl. Pulau Morotai No 89 Jaga Baya III, Way Halim – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

**SURAT PERNYATAAN
NOMOR 004/PW.07/LA/04/2023**

Sehubungan dengan kebutuhan perubahan data transaksi keuangan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung berupa koreksi data transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan data SPAN untuk keperluan penyusunan LKKL TA 2022 Audited, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Widodo Wuryanto, S.IP., MSi.
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
4. Eselon I : Sekretaris Jenderal
5. Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan sebagaimana tersebut di atas telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 17 April 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

NIP. 19701204 199009 1 001